

Muhammad Wahid Nur Tualeka

REVORMASI
R



Membangun
MODERASI
BERAGAMA

Peran Dakwah Elit di Surabaya



*Menjadi Mitra Terpercaya Penulis
Dalam Berkarya Adalah Visi Kami*

MEMBANGUN MODERASI BERAGAMA
Peran Dakwah Elit di Surabaya

Muhammad Wahid Nur Tualeka



Membangun Moderasi Beragama:

Peran Dakwah Elit di Surabaya

© Muhammad Wahid Nur Tualeka

Cetakan 1: September 2025

Ukuran: 15 x 23 cm

ISBN: 978-634-7384-04-1

Penerbit Revormasi


PT. Revormasi Jangkar Philosophia

Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah

 **revormasi.com**

 **@penerbitrevormasi**

 **Penerbit Revormasi**

 **0851-7963-2023**

© Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak isi buku tanpa seizin tertulis dari penerbit.

Prakata

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya buku ini dapat hadir di hadapan pembaca. Buku ini lahir dari sebuah proses penelitian disertasi yang panjang tentang bagaimana para elit Muhammadiyah di Kota Surabaya menginternalisasikan moderasi beragama melalui dakwah yang inklusif, dialogis, dan berlandaskan nilai-nilai *washatiyah*.

Di tengah derasnya arus informasi, meningkatnya polarisasi, serta tantangan menjaga kerukunan di masyarakat multikultural, moderasi beragama menjadi kebutuhan yang tak terelakkan. Surabaya menjadi contoh menarik: pernah menjadi saksi luka akibat peristiwa teror bom, kini bertransformasi menjadi kota yang semakin dikenal karena toleransinya. Di balik transformasi ini, ada peran strategis para tokoh agama, khususnya elit Muhammadiyah, yang patut dipelajari dan diteladani.

Buku ini penulis susun tidak semata-mata untuk akademisi atau peneliti, tetapi juga untuk pembaca umum, pegiat dakwah, pemimpin komunitas, dan siapa pun yang peduli pada harmoni kehidupan beragama. Gaya penyajiannya penulis buat semi-formal: tetap berbasis data, namun mengalir seperti cerita dan dilengkapi refleksi yang membumi. Agar pembaca lebih mudah menjelajahi isi, berikut gambaran singkat setiap bab.

Bab 1 Moderasi Beragama: Kebutuhan di Tengah Keberagaman. Bab pembuka ini mengajak kita memahami konteks besar mengapa moderasi beragama penting di Indonesia. Kita akan melihat ancaman radikalisme, potret intoleransi, dan perjalanan Surabaya dari luka tragedi menuju kota toleran.

Bab 2 Muhammadiyah dan Spirit Dakwah yang Mencerahkan. Bab ini memaparkan sejarah, karakteristik, dan prinsip dakwah Muhammadiyah yang berpijak pada nilai *washatiyah*. Termasuk bagaimana struktur elit Muhammadiyah di tingkat lokal menjadi motor penggerak perubahan sosial.

Bab 3 Memahami Moderasi Beragama dari Perspektif Islam. Di sini dibahas landasan teologis moderasi dalam Al-Qur'an dan hadis, nilai-nilai kunci seperti *Tawassuth*, *I'tidal*, *Tasamuh*, dan *Ishlah*, serta prinsip dan indikator moderasi beragama yang dapat diukur di masyarakat.

Bab 4 Strategi Dakwah Moderat Muhammadiyah Surabaya. Bab ini menguraikan metode dakwah yang digunakan para elit Muhammadiyah, mulai dari dakwah lisan, aksi sosial, media digital, hingga keterlibatan aktif di Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Bab 5 Model Internalisasi Moderasi Beragama. Pembaca akan menemukan kerangka model yang dibangun dari penelitian lapangan: penguatan kelembagaan, peneguhan identitas keislaman yang mencerahkan, pendekatan inklusif, dan penguatan nilai *washatiyah* di ruang publik.

Bab 6 Tantangan di Lapangan. Tidak semua berjalan mulus. Bab ini membahas hambatan seperti kelompok beraliran keras, rendahnya pemahaman generasi muda, distorsi ajaran di media sosial, dan konflik pendirian rumah ibadah, serta strategi untuk mengatasinya.

Bab 7 Inspirasi dari Surabaya. Di sini disajikan kisah-kisah nyata kerukunan antarumat beragama di Surabaya, termasuk peran Muhammadiyah dalam merajut toleransi dan harmoni.

Bab 8 Penutup: Menyemai Moderasi untuk Masa Depan. Bab terakhir merangkum temuan utama, refleksi penulis, serta rekomendasi praktis bagi masyarakat, pemerintah, dan organisasi keagamaan untuk memperkuat moderasi beragama di Indonesia.

Akhir kata, penulis berharap buku ini menjadi jendela pemahaman yang lebih luas tentang moderasi beragama, sekaligus sumber inspirasi untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Surabaya telah membuktikan bahwa luka masa lalu bisa menjadi pijakan untuk membangun masa depan yang lebih damai. Semoga semangat ini menyebar ke seluruh pelosok negeri. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Daftar Isi

PRAKATA	V
BAB 1 MODERASI BERAGAMA: KEBUTUHAN DI TENGAH KEBERAGAMAN.....	11
INDONESIA: RUMAH BAGI RAGAM KEYAKINAN	12
MODERASI BERAGAMA: KONSEP DAN URGENSINYA	14
ANCAMAN RADIKALISME DAN INTOLERANSI DI ERA MODERN	16
SURABAYA: DARI LUKA BOM MENUJU KOTA TOLERAN.....	18
MENGAPA PERAN ELIT PENTING	20
BAB 2 MUHAMMADIYAH DAN SPIRIT DAKWAH YANG MENCERAHKAN	23
SEJARAH SINGKAT MUHAMMADIYAH	24
KARAKTER DAKWAH MUHAMMADIYAH: AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR..	26
PRINSIP WASHATIYAH DALAM GERAKAN MUHAMMADIYAH	29
STRUKTUR DAN PERAN ELIT MUHAMMADIYAH DI TINGKAT LOKAL.....	33
MUHAMMADIYAH DAN POLITIK KEBANGSAAN	35
BAB 3 MEMAHAMI MODERASI BERAGAMA DARI PERSPEKTIF ISLAM DAN MUHAMMADIYAH	39
DASAR AL-QUR'AN DAN HADIS	40
NILAI INTI: TAWASSUTH, I'TIDAL, TASAMUH, ISHLAH.....	42
PRINSIP, INDIKATOR, DAN FUNGSI MODERASI BERAGAMA	45
MODERASI DALAM DAKWAH.....	47
TANTANGAN DI MASYARAKAT MULTIKULTURAL	49
BAB 4 STRATEGI DAKWAH MODERAT MUHAMMADIYAH SURABAYA	53
DAKWAH BIL-LISAN: CERAMAH, DISKUSI, KAJIAN.....	55
DAKWAH BIL-HAL: PENDIDIKAN DAN PELAYANAN SOSIAL	57
DAKWAH BIL-QALAM: MEDIA TULIS DAN DIGITAL	60
DAKWAH DIALOGIS DI FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) ..	62
MENJANGKAU GENERASI MUDA.....	64

BAB 5	MODEL INTERNALISASI MODERASI BERAGAMA	67
	LANDASAN PEMIKIRAN DAN TEOLOGI	68
	PENGUATAN MODERASI MELALUI KELEMBAGAAN	71
	PENEGUHAN IDENTITAS KEISLAMAN YANG MENCERAHKAN	73
	PENDEKATAN INKLUSIF DAN DIALOGIS.....	75
	PENGUATAN NILAI WASHATIYAH DI RUANG PUBLIK	77
BAB 6	TANTANGAN DI LAPANGAN	79
	MUNCULNYA KELOMPOK BERALIRAN KERAS	81
	MINIMNYA PEMAHAMAN GENERASI MUDA	83
	DISTORSI AJARAN DI MEDIA SOSIAL.....	85
	KONFLIK PENDIRIAN RUMAH IBADAH.....	87
	STRATEGI MENGHADAPI TANTANGAN.....	89
BAB 7	INSPIRASI DARI SURABAYA	91
	KISAH SUKSES KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	92
	PERAN ELIT MUHAMMADIYAH DALAM MERAJUT TOLERANSI	94
	PELAJARAN BAGI KOTA-KOTA LAIN DI INDONESIA	96
BAB 8	PENUTUP: MENYEMAI MODERASI UNTUK MASA DEPAN	99
	RINGKASAN DAN REFLEKSI	100
	REKOMENDASI UNTUK MASYARAKAT, PEMERINTAH, DAN ORGANISASI KEAGAMAAN	102
DAFTAR PUSTAKA	105
TENTANG PENULIS	115
GLOSARIUM	117
INDEKS	121

Bab 1

Moderasi Beragama:
Kebutuhan di Tengah
Keberagaman

Indonesia: Rumah Bagi Ragam Keyakinan

Indonesia adalah sebuah mosaik besar yang tersusun dari beragam agama, etnis, dan budaya. Dari Sabang hingga Merauke, kita dapat menemukan rumah ibadah yang berdiri berdampingan: masjid, gereja, pura, vihara, dan klenteng. Keanekaragaman ini bukanlah hal baru, melainkan warisan sejarah panjang interaksi antarbangsa, perdagangan, dan migrasi yang berlangsung sejak berabad-abad lalu. Indonesia memang ditakdirkan menjadi tanah air bagi banyak keyakinan dan tradisi spiritual.

Sejarah mencatat bahwa masuknya Islam ke Nusantara tidak menghapus tradisi lokal, tetapi justru menyerap dan mengolahnya menjadi kekuatan baru. Demikian pula kedatangan Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu yang sebelumnya telah hidup berdampingan dengan keyakinan masyarakat lokal. Interaksi ini membentuk wajah plural Indonesia, di mana perbedaan bukanlah hal yang asing, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari (Azra, 2002).

Keberagaman Indonesia diakui secara konstitusional. Pancasila, dengan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”, menegaskan bahwa bangsa ini dibangun di atas fondasi religiusitas, tetapi tetap memberi ruang bagi keragaman ekspresi iman. Pasal 29 UUD 1945 juga menegaskan jaminan kebebasan beragama bagi seluruh warga negara. Artinya, negara tidak hanya mengakui adanya pluralitas keyakinan, tetapi juga berkewajiban melindunginya.

Namun, pluralitas itu bukan tanpa tantangan. Fakta bahwa Indonesia terdiri dari lebih 17.000 pulau dengan lebih dari 300 kelompok etnis, membuat perjumpaan antaridentitas sering menimbulkan gesekan. Dari sini lahirlah kebutuhan untuk membangun sikap saling menghargai dan memahami, bukan hanya dalam ranah sosial, tetapi juga politik dan hukum.

Di sinilah konsep moderasi beragama menemukan relevansinya. Keberagaman yang sangat luas tanpa kendali

berisiko melahirkan konflik horizontal, terutama ketika perbedaan keyakinan dipolitisasi. Moderasi hadir sebagai penyeimbang, agar keberagaman masyarakat Indonesia tetap sejalan dengan nilai kebangsaan. Seperti ditegaskan Kementerian Agama RI (2019), moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang selalu mengambil posisi di tengah, adil, dan tidak ekstrem.

Pengalaman sejarah Indonesia menunjukkan bahwa toleransi antarumat beragama tidak hanya dibangun oleh negara, melainkan juga oleh peran tokoh agama, organisasi masyarakat, dan komunitas lokal. Misalnya, di banyak daerah, masjid dan gereja secara rutin bekerja sama dalam kegiatan sosial seperti donor darah, bakti lingkungan, atau bantuan bencana. Inilah bukti nyata bahwa keberagaman dapat menjadi kekuatan sosial, bukan sumber perpecahan.

Sayangnya, keberagaman juga seringkali dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menegaskan dominasi identitas. Kasus penolakan pembangunan rumah ibadah, ujaran kebencian atas nama agama, hingga diskriminasi minoritas masih sering terjadi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa pengakuan formal terhadap keragaman tidak selalu berbanding lurus dengan penerimaan di tingkat masyarakat (Crouch, 2010).

Meskipun demikian, banyak penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya masih memiliki modal sosial yang kuat berupa nilai gotong royong dan musyawarah. Kedua nilai ini dapat menjadi jembatan dalam merawat harmoni di tengah perbedaan keyakinan. Bahkan, Surabaya sendiri pernah menjadi contoh bagaimana semangat kebersamaan muncul pasca tragedi bom 2018, ketika masyarakat lintas agama bahu-membahu saling mendukung.

Dengan demikian, Indonesia memang bukan hanya sebuah negara dengan keberagaman, melainkan “rumah besar” di mana semua keyakinan bisa hidup berdampingan. Namun, rumah ini memerlukan upaya terus-menerus untuk dirawat, dijaga, dan diperkuat. Moderasi beragama menjadi salah satu

pilar utama agar rumah bersama ini tetap kokoh, tidak runtuh oleh badai radikalisme dan intoleransi.

Moderasi Beragama: Konsep dan Urgensinya

Istilah *moderasi beragama* belakangan semakin populer di Indonesia, terutama setelah Kementerian Agama RI menjadikannya sebagai salah satu program prioritas nasional sejak 2019. Namun, konsep ini sejatinya bukan hal baru. Dalam tradisi Islam, misalnya, gagasan tentang *wasathiyah*—sikap tengah atau keseimbangan—telah lama dikenal. Moderasi beragama berarti tidak condong ke ekstrem kanan yang cenderung radikal, maupun ekstrem kiri yang cenderung liberal, melainkan mengambil jalan tengah yang adil dan proporsional (Al-Qaradawi, 2010).

Moderasi beragama perlu dibedakan dari sekadar toleransi. Jika toleransi sering dipahami sebagai kesediaan membiarkan orang lain berbeda, moderasi beragama melangkah lebih jauh: ia menekankan keterlibatan aktif dalam membangun kehidupan bersama yang harmonis. Moderasi bukan berarti mengurangi keyakinan atau melemahkan iman, melainkan mengekspresikan keyakinan dengan cara yang menghormati hak orang lain untuk berbeda.

Dalam konteks Indonesia, urgensi moderasi beragama tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial yang plural. Sebagaimana disebutkan dalam data Badan Pusat Statistik (BPS, 2020), Indonesia memiliki lebih dari 268 juta penduduk dengan beragam latar belakang agama, etnis, dan budaya. Tanpa moderasi, perbedaan ini mudah dieksploitasi oleh kelompok tertentu untuk kepentingan politik atau ideologis, yang dapat memicu konflik horizontal.

Moderasi beragama juga sangat penting di era globalisasi dan digitalisasi. Akses informasi yang terbuka di internet membuat narasi radikal atau intoleran mudah menyebar tanpa filter. Survei Setara Institute (2019) menunjukkan bahwa media

sosial menjadi salah satu saluran utama penyebaran intoleransi dan ujaran kebencian berbasis agama. Di sinilah moderasi beragama diperlukan sebagai *filter kognitif* dan *sikap sosial* agar masyarakat tidak mudah terprovokasi.

Dari sisi akademik, para sarjana menyebut moderasi beragama sebagai “strategi menjaga koeksistensi” (Abu-Nimer, 2018). Artinya, moderasi bukan sekadar jargon, tetapi sebuah strategi sosial-politik yang dapat memastikan keberlanjutan bangsa. Tanpa sikap moderat, keberagaman Indonesia justru bisa berubah menjadi sumber perpecahan.

Selain itu, moderasi beragama memiliki dimensi moral dan spiritual. Agama apa pun pada dasarnya mengajarkan kasih sayang, kedamaian, dan penghormatan terhadap sesama. Ketika nilai-nilai tersebut dipraktikkan secara konsisten, masyarakat akan lebih mudah membangun solidaritas lintas iman. Dalam Islam, hal ini tercermin dalam prinsip *rahmatan lil ‘alamin*, bahwa agama hadir untuk membawa rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya untuk kelompok tertentu.

Urgensi moderasi beragama juga dapat dilihat dari meningkatnya kasus intoleransi di Indonesia dalam dua dekade terakhir. Laporan Wahid Foundation (2017) mencatat adanya peningkatan insiden pelanggaran kebebasan beragama, baik dalam bentuk pelarangan ibadah, perusakan rumah ibadah, maupun diskriminasi terhadap minoritas. Fakta ini menegaskan bahwa tanpa moderasi, ruang publik bisa didominasi oleh kelompok intoleran.

Namun, penting digarisbawahi bahwa moderasi bukan berarti kompromi tanpa prinsip. Seorang Muslim yang moderat tetap teguh memegang ajaran agamanya, tetapi dalam mengekspresikannya, ia memilih cara yang seimbang, adil, dan menghargai hak orang lain. Inilah yang membedakan moderasi dari relativisme. Moderasi menjaga agar keberagaman tetap kokoh, tetapi juga tidak menutup pintu dialog.

Dengan demikian, moderasi beragama bukan hanya kebutuhan teoretis, melainkan kebutuhan praktis bangsa

Indonesia. Di tengah keberagaman dan tantangan global, moderasi adalah jalan untuk menjaga harmoni sosial, memperkuat ketahanan nasional, dan memastikan bahwa keberagaman tetap menjadi kekuatan, bukan kelemahan.

Ancaman Radikalisme dan Intoleransi di Era Modern

Radikalisme dan intoleransi merupakan tantangan serius yang mengancam fondasi keberagaman Indonesia. Keduanya muncul bukan hanya dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga melalui wacana, simbol, dan narasi keagamaan yang memecah belah. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan di era modern ketika teknologi digital mempermudah penyebaran ideologi ekstrem tanpa batas ruang dan waktu.

Radikalisme biasanya dipahami sebagai sikap yang menginginkan perubahan secara cepat, total, dan sering kali menggunakan kekerasan sebagai cara mencapai tujuan. Dalam konteks keagamaan, radikalisme menolak perbedaan tafsir, menganggap kelompok di luar dirinya sebagai sesat, bahkan tidak jarang melabeli orang lain sebagai kafir. Dari sini kemudian lahir intoleransi, yaitu penolakan terhadap keberadaan kelompok lain, baik dalam bentuk ujaran kebencian, diskriminasi, maupun persekusi (Azra, 2016).

Indonesia memiliki pengalaman pahit terkait radikalisme agama, mulai dari peristiwa bom Bali tahun 2002, hingga rangkaian aksi teror di berbagai kota, termasuk di Surabaya pada tahun 2018. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bahwa radikalisme bukan sekadar wacana, tetapi telah bertransformasi menjadi aksi nyata yang menelan korban jiwa dan mencederai kerukunan nasional (ICG, 2018).

Di era digital, ancaman radikalisme semakin kompleks. Media sosial menjadi ruang subur bagi penyebaran ideologi intoleran. Menurut penelitian PPIM UIN Jakarta (2017), sekitar

58% konten keagamaan yang beredar di media sosial berpotensi mengandung intoleransi dan ujaran kebencian. Konten semacam ini mudah dikonsumsi generasi muda yang aktif berselancar di dunia maya, tetapi belum memiliki literasi kritis yang memadai.

Selain faktor ideologis, radikalisme juga dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi. Kesenjangan ekonomi, pengangguran, dan ketidakpuasan terhadap pemerintah sering kali dieksploitasi oleh kelompok radikal untuk merekrut anggota baru. Narasi mereka sederhana namun menggugah: menjanjikan perubahan cepat melalui “kembali pada agama yang murni”, meskipun dengan cara-cara kekerasan (Hasan, 2018).

Intoleransi juga kerap muncul dalam ranah politik. Identitas agama digunakan sebagai alat mobilisasi massa, terutama dalam kontestasi elektoral. Fenomena “politik identitas” ini terlihat jelas dalam beberapa pemilihan kepala daerah maupun pemilu nasional, di mana isu agama dijadikan senjata untuk menjatuhkan lawan politik. Akibatnya, masyarakat terpolarisasi dan ruang publik tercemar oleh kebencian berbasis identitas (Mietzner & Muhtadi, 2019).

Meski demikian, tidak semua intoleransi berujung pada radikalisme. Ada spektrum yang berlapis: mulai dari intoleransi kultural, diskriminasi struktural, hingga radikalisme ideologis. Namun, semuanya memiliki potensi yang sama untuk mengikis sendi-sendi kehidupan berbangsa jika tidak ditangani dengan tepat. Di sinilah moderasi beragama menjadi kunci penting untuk meredam dan mengantisipasi ancaman ini.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi radikalisme, seperti melalui program deradikalisasi, penguatan pendidikan agama, hingga literasi digital. Namun, peran tokoh agama dan organisasi keagamaan tetap menjadi faktor penentu. Mereka memiliki legitimasi moral dan kedekatan dengan masyarakat yang memungkinkan pesan moderasi lebih mudah diterima.

Dengan kata lain, ancaman radikalisme dan intoleransi di era modern tidak bisa dianggap remeh. Ia bukan hanya persoalan keamanan, tetapi juga menyangkut masa depan kohesi sosial bangsa. Jika tidak ditangani serius, Indonesia bisa kehilangan salah satu aset terbesarnya: keberagaman sebagai kekuatan. Oleh karena itu, membangun budaya moderasi beragama bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga keutuhan bangsa.

Surabaya: Dari Luka Bom Menuju Kota Toleran

Surabaya pernah menjadi saksi luka mendalam ketika pada Mei 2018, serangkaian bom bunuh diri meledak di tiga gereja dan satu kantor kepolisian. Tragedi ini menewaskan puluhan orang, melukai ratusan, dan meninggalkan trauma sosial yang panjang. Bagi banyak warga, kejadian itu adalah titik nadir dari ancaman radikalisme di tengah kota metropolitan yang selama ini dikenal sebagai kota perdagangan dan toleransi (Tempo, 2018).

Namun, Surabaya juga menunjukkan ketangguhannya. Hanya beberapa hari pasca tragedi, masyarakat lintas agama bergandengan tangan untuk saling menguatkan. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, tokoh Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu bersatu menyatakan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan atas nama agama. Tindakan simbolis seperti doa lintas iman, penjagaan bersama rumah ibadah, hingga aksi solidaritas di jalanan memperlihatkan bahwa teror tidak berhasil memecah belah warga Surabaya (Fealy, 2018).

Keberhasilan Surabaya bangkit dari luka bom tidak bisa dilepaskan dari peran organisasi keagamaan dan tokoh elitnya. Muhammadiyah misalnya, melalui berbagai cabang dan rantingnya, menggerakkan bantuan kemanusiaan, mengunjungi korban, serta menegaskan bahwa Islam menolak segala bentuk

terorisme. Dakwah bil-hal—yakni melalui aksi nyata—menjadi senjata paling efektif untuk meredam stigma negatif terhadap umat Islam pasca tragedi.

Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya dengan cepat merespons dengan memperkuat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta membangun jaringan komunikasi dengan tokoh-tokoh lintas agama. Langkah ini penting untuk menegaskan bahwa negara hadir melindungi semua warganya, sekaligus memastikan agar insiden serupa tidak memicu diskriminasi baru terhadap kelompok agama tertentu.

Tragedi bom 2018 juga melahirkan berbagai inisiatif toleransi di tingkat akar rumput. Salah satunya adalah terbentuknya “kampung toleransi” di beberapa wilayah kota. Di kampung-kampung ini, masyarakat lintas iman sepakat menjaga kerukunan melalui kegiatan bersama seperti kerja bakti, perayaan hari besar agama secara gotong royong, dan forum silaturahmi lintas iman. Kehadiran kampung toleransi membuktikan bahwa harmoni sosial dapat dibangun dari bawah, bukan hanya melalui kebijakan pemerintah.

Surabaya juga menjadi kota yang aktif dalam gerakan literasi damai. Sejumlah sekolah dan perguruan tinggi meluncurkan program edukasi tentang bahaya radikalisme sekaligus mempromosikan nilai moderasi beragama. Kegiatan seperti seminar lintas iman, pelatihan resolusi konflik, dan lomba kreatif bertema toleransi menjadi media efektif untuk menanamkan kesadaran sejak dini. Generasi muda didorong untuk menjadi agen perdamaian, bukan korban propaganda kebencian (Syafiq, 2019).

Meski luka bom 2018 tidak mudah dilupakan, peristiwa itu justru menjadi momentum penting bagi Surabaya untuk mempertegas identitasnya sebagai kota toleran. Dari tragedi lahirlah solidaritas, dari keterpurukan bangkitlah semangat baru untuk saling menjaga. Surabaya menunjukkan bahwa intoleransi dan radikalisme bisa dilawan, bukan hanya dengan aparat

keamanan, tetapi juga dengan solidaritas sosial dan nilai kemanusiaan.

Pelajaran yang bisa diambil adalah bahwa kekerasan berbasis agama tidak selalu meninggalkan warisan kebencian. Jika ditangani dengan cepat, kolaboratif, dan melibatkan masyarakat luas, luka dapat berubah menjadi energi positif untuk memperkuat persatuan. Surabaya telah membuktikannya, dan menjadi inspirasi bagi kota-kota lain di Indonesia dalam membangun budaya toleransi.

Dengan demikian, Surabaya bukan hanya kota yang pernah terluka, tetapi juga kota yang bangkit. Dari luka bom menuju kota toleran, Surabaya menghadirkan narasi optimisme bahwa bangsa ini mampu melawan radikalisme dengan persatuan, dialog, dan keberanian merangkul perbedaan.

Mengapa Peran Elit Penting

Dalam dinamika kehidupan sosial-keagamaan, peran elit selalu menempati posisi strategis. Elit yang dimaksud di sini bukan semata-mata pejabat politik, tetapi juga tokoh agama, pimpinan organisasi masyarakat, akademisi, dan figur publik yang memiliki pengaruh signifikan di lingkungannya. Kehadiran mereka sering kali menjadi penentu arah wacana publik, termasuk dalam konteks membangun moderasi beragama di Indonesia.

Elit agama misalnya, memiliki otoritas moral yang sangat kuat di mata umat. Ucapan, sikap, dan teladan mereka dapat memengaruhi persepsi serta perilaku masyarakat luas. Karena itu, jika elit agama konsisten menyuarakan moderasi, toleransi, dan anti-kekerasan, maka pesan tersebut akan lebih mudah diterima dibanding sekadar himbauan pemerintah. Sebaliknya, bila elit agama menyebarkan narasi intoleran, dampaknya bisa jauh lebih destruktif (Bruinessen, 2013).

Dalam konteks Surabaya, peran elit Muhammadiyah menjadi contoh nyata. Melalui dakwah bil-lisan, bil-qalam, maupun bil-hal, para tokoh Muhammadiyah mampu mengarahkan wacana keagamaan pada nilai-nilai wasathiyah (keseimbangan). Hal ini penting untuk menegaskan bahwa Islam di Surabaya bukanlah ancaman, melainkan kekuatan moral yang mendukung kehidupan kota yang damai dan inklusif.

Elit politik juga berperan penting, meskipun dengan karakteristik berbeda. Mereka memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan yang dapat memperkuat atau justru melemahkan toleransi. Misalnya, kebijakan tentang pendirian rumah ibadah, pendidikan agama di sekolah, hingga alokasi anggaran untuk kegiatan lintas iman. Jika elit politik bersikap inklusif, maka masyarakat akan lebih mudah menerima keberagaman sebagai bagian dari kehidupan berbangsa (Mujani & Liddle, 2009).

Selain elit agama dan politik, elit intelektual seperti akademisi, peneliti, dan jurnalis juga tidak kalah penting. Mereka menyediakan kerangka analisis, data, serta wacana alternatif yang dapat mengimbangi narasi radikal. Dalam era media digital, suara intelektual yang jernih dan berbasis bukti menjadi benteng penting melawan hoaks dan ujaran kebencian.

Peran elit menjadi semakin penting karena masyarakat pada umumnya membutuhkan figur rujukan. Dalam situasi krisis atau konflik, suara tokoh sering kali lebih didengar dibanding instruksi birokrasi. Misalnya, pasca bom Surabaya 2018, seruan tokoh agama lintas iman untuk menjaga kerukunan lebih cepat menenangkan publik dibanding pernyataan resmi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi moral elit lebih efektif dalam meredam ketegangan sosial.

Namun, tidak semua elit memainkan peran positif. Sebagian justru terjebak dalam politik identitas yang memperkuat polarisasi. Ketika elit menggunakan agama

sebagai alat politik, mereka secara tidak langsung memberi ruang bagi tumbuhnya intoleransi. Oleh karena itu, kualitas kepemimpinan elit sangat menentukan: apakah akan memperkuat harmoni, atau sebaliknya, memperuncing perbedaan.

Moderasi beragama pada akhirnya tidak bisa hanya menjadi program struktural pemerintah. Ia memerlukan “agen-agen moral” yang mampu menjembatani nilai-nilai agama dengan kebutuhan kehidupan bersama. Di sinilah elit berperan sebagai penghubung: mengartikulasikan pesan agama agar kontekstual, relevan, dan menyejukkan di tengah masyarakat majemuk.

Dengan demikian, peran elit penting bukan sekadar karena posisi sosial mereka, melainkan karena kemampuan mereka memengaruhi arah diskursus publik. Melalui keteladanan, komunikasi yang inklusif, dan keberanian menolak intoleransi, elit dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga moderasi beragama. Sebaliknya, jika mereka abai, potensi keretakan sosial akan semakin besar.

Bab 2

Muhammadiyah dan Spirit Dakwah yang Mencerahkan

Sejarah Singkat Muhammadiyah

Muhammadiyah lahir pada awal abad ke-20, tepatnya 18 November 1912 di Yogyakarta, dipelopori oleh K.H. Ahmad Dahlan. Kehadirannya tidak bisa dilepaskan dari situasi sosial dan keagamaan saat itu. Umat Islam Indonesia tengah menghadapi berbagai tantangan: kemunduran pendidikan, dominasi kolonialisme Belanda, serta merebaknya praktik keagamaan yang bercampur dengan tradisi lokal yang kadang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam murni. Ahmad Dahlan, seorang ulama yang terbuka terhadap pembaruan, melihat perlunya gerakan Islam yang mampu menjawab tantangan zaman dengan cara yang lebih rasional, terdidik, dan sistematis (Nashir, 2010).

Sejak awal, Muhammadiyah memposisikan diri sebagai gerakan dakwah dan tajdid (pembaruan). Dakwah Muhammadiyah tidak hanya berbicara soal ibadah ritual, melainkan juga pembaruan dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. K.H. Ahmad Dahlan mendirikan sekolah-sekolah modern yang memadukan pelajaran agama dan ilmu umum, sesuatu yang kala itu dianggap revolusioner. Dengan cara ini, Muhammadiyah berusaha menyiapkan generasi Muslim yang berilmu sekaligus beriman (Noer, 1996).

Gerakan ini cepat mendapat sambutan luas. Cabang-cabang Muhammadiyah mulai bermunculan di berbagai kota, terutama di Jawa, lalu menyebar ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga seluruh Indonesia. Keberhasilan penyebaran ini tidak lepas dari pendekatan dakwah Muhammadiyah yang rasional, sederhana, dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Selain sekolah, Muhammadiyah juga mendirikan rumah sakit, panti asuhan, dan berbagai lembaga sosial sebagai wujud nyata ajaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

Dalam perkembangannya, Muhammadiyah juga memainkan peran penting dalam kebangkitan nasional. Pada

masa pergerakan kemerdekaan, tokoh-tokoh Muhammadiyah aktif dalam organisasi seperti Sarekat Islam, BPUPKI, hingga perumusan dasar negara. Kontribusi Muhammadiyah tidak hanya dalam bidang keagamaan, tetapi juga kebangsaan. Pandangan Muhammadiyah yang inklusif membuatnya dapat diterima dalam dinamika politik kebangsaan tanpa kehilangan identitas keislamannya (Alfian, 1989).

Pasca kemerdekaan, Muhammadiyah semakin kokoh sebagai organisasi modern dengan struktur yang rapi. Ia mengembangkan berbagai amal usaha: sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, rumah sakit, klinik, hingga bank syariah. Hingga kini, Muhammadiyah dikenal sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di dunia, dengan jutaan anggota dan amal usaha yang tersebar luas di seluruh pelosok negeri.

Namun, Muhammadiyah tidak berhenti pada pembangunan fisik dan kelembagaan. Spirit yang selalu dijaga adalah bagaimana dakwah tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Tantangan modernisasi, globalisasi, hingga digitalisasi memaksa Muhammadiyah untuk terus beradaptasi. Inilah yang membuat gerakan ini tetap bertahan lebih dari satu abad, bahkan semakin relevan di tengah perubahan sosial yang cepat.

Salah satu ciri khas Muhammadiyah adalah keterbukaannya pada ilmu pengetahuan. Sejak awal, Ahmad Dahlan mengajarkan pentingnya mengaji Al-Qur'an dengan metode tafsir yang rasional, bukan sekadar taklid buta. Hal ini mendorong tumbuhnya tradisi intelektual di kalangan warga Muhammadiyah. Universitas Muhammadiyah yang kini berjumlah lebih dari seratus di seluruh Indonesia adalah wujud nyata dari tradisi keilmuan tersebut.

Gerakan Muhammadiyah juga selalu menekankan pentingnya amal sosial sebagai bagian dari dakwah. Dakwah tidak berhenti pada mimbar masjid, tetapi diwujudkan dalam pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan advokasi kebijakan publik. Dengan demikian, Muhammadiyah hadir

bukan hanya untuk umat Islam, tetapi juga untuk seluruh bangsa Indonesia.

Kini, memasuki era abad ke-21, Muhammadiyah terus memainkan peran strategis dalam kehidupan berbangsa. Melalui gerakan dakwah yang mencerahkan, Muhammadiyah berusaha menampilkan wajah Islam yang moderat, rasional, dan berorientasi pada kemaslahatan. Perjalanan panjang sejak 1912 hingga kini menunjukkan bahwa Muhammadiyah bukan sekadar organisasi, melainkan sebuah gerakan sosial-keagamaan yang membentuk wajah Islam Indonesia modern.

Karakter Dakwah Muhammadiyah: Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah menegaskan bahwa dakwahnya berlandaskan pada prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*—mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Prinsip ini bersumber dari Al-Qur'an (QS. Ali Imran: 104) yang memerintahkan agar ada segolongan umat yang senantiasa menyeru kepada kebaikan. Dalam konteks Muhammadiyah, ajaran ini dimaknai tidak hanya dalam ranah teologis, tetapi juga sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat (Nashir, 2010).

Karakter dakwah Muhammadiyah yang menekankan *amar ma'ruf nahi munkar* tampak dalam orientasinya yang solutif. Muhammadiyah tidak hanya menyerukan nilai-nilai kebaikan melalui ceramah, tetapi juga menghadirkan solusi nyata atas persoalan umat. Misalnya, ketika melihat keterbelakangan pendidikan umat Islam pada awal abad ke-20, Muhammadiyah mendirikan sekolah modern; ketika melihat lemahnya layanan kesehatan, Muhammadiyah membangun rumah sakit. Dengan kata lain, dakwah diwujudkan dalam bentuk amal usaha sebagai implementasi nyata ajaran Islam (Noer, 1996).

Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dalam dakwah Muhammadiyah juga menolak fanatisme sempit. Kebaikan yang diperjuangkan Muhammadiyah bersifat universal, tidak terbatas hanya untuk umat Islam. Rumah sakit dan sekolah Muhammadiyah, misalnya, terbuka untuk siapa pun tanpa melihat latar belakang agama. Hal ini mencerminkan dakwah yang membebaskan, mencerahkan, dan berpihak pada kemanusiaan universal (*rahmatan lil 'alamin*).

Selain itu, karakter dakwah Muhammadiyah bercirikan rasional dan kontekstual. Dakwah bukan sekadar menyampaikan pesan agama secara tekstual, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Inilah sebabnya dakwah Muhammadiyah sering kali menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan modernisasi. Dengan gaya ini, Muhammadiyah mampu merangkul kalangan terdidik dan urban, sehingga gerakannya cepat berkembang ke seluruh Indonesia (Alfian, 1989).

Di sisi lain, *nahi munkar* dalam Muhammadiyah juga diwujudkan dengan cara yang bijak. Muhammadiyah tidak mengedepankan kekerasan atau konfrontasi, melainkan mendorong perubahan melalui pendidikan, advokasi, dan keteladanan. Misalnya, dalam isu penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, atau ketidakadilan sosial, Muhammadiyah sering memberikan kritik moral sekaligus menawarkan alternatif solusi berbasis etika Islam. Dengan demikian, dakwah Muhammadiyah menampilkan wajah Islam yang tegas terhadap kemungkaran, tetapi tetap santun dan konstruktif.

Karakter dakwah Muhammadiyah juga dapat dilihat dalam pendekatan *bil-hal*—yakni dakwah melalui tindakan nyata. Pendekatan ini membuat Muhammadiyah lebih mudah diterima masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan kebutuhan sosial yang mendesak. Amal usaha pendidikan, kesehatan, dan sosial bukan hanya sarana dakwah, tetapi juga bukti komitmen Muhammadiyah terhadap kesejahteraan rakyat.

Lebih jauh, dakwah Muhammadiyah berusaha menyeimbangkan dimensi ibadah dengan dimensi sosial. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*hablun minallah*), tetapi juga hubungan dengan sesama manusia (*hablun minannas*). Oleh karena itu, amar ma'ruf nahi munkar tidak cukup diwujudkan dalam ibadah ritual, tetapi harus ditransformasikan dalam aksi sosial, ekonomi, dan budaya.

Dalam perkembangan modern, dakwah Muhammadiyah juga mulai merambah ruang digital. Media sosial, website resmi, dan kanal YouTube menjadi sarana baru untuk menyuarakan nilai-nilai amar ma'ruf nahi munkar. Kehadiran dakwah digital ini penting untuk menjawab tantangan era informasi, sekaligus menjadi benteng melawan narasi radikalisme yang juga gencar beredar di dunia maya (Burhani, 2016).

Dengan demikian, karakter dakwah Muhammadiyah yang berlandaskan amar ma'ruf nahi munkar menegaskan bahwa Islam adalah agama yang membimbing manusia menuju kebaikan dan mencegah kerusakan dengan cara yang rasional, moderat, dan konstruktif. Dakwah bukan sekadar retorika, tetapi aksi nyata yang mencerahkan umat dan bangsa.

Muhammadiyah sebagai organisasi sosial-keagamaan menunjukkan fleksibilitasnya dalam merespons dinamika zaman dengan mengintegrasikan nilai-nilai modernitas berbasis ilmu pengetahuan yang konstruktif. Ahmad Najib Burhani bahkan memberi sejumlah sebutan bagi Muhammadiyah, seperti Islam modernis, Islam moderat, Islam murni, hingga Islam berkemajuan (Burhani & Khoirudin, 2016). Dengan konsep dakwah yang senantiasa beradaptasi dengan perkembangan zaman, Muhammadiyah menempatkan moderasi beragama sebagai inti gerakannya yang diimplementasikan secara luas, termasuk di tingkat global.

Upaya pencerahan peradaban melalui moderasi beragama sejalan dengan visi keislaman Muhammadiyah. Zuly Qodir menegaskan bahwa peran Muhammadiyah dalam dinamika Islam di Indonesia sangat signifikan, karena

menawarkan wajah Islam yang moderat dan inklusif (Qodir, 2019a). Narasi ini semakin mendapat sorotan publik ketika Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyampaikan pidato pengukuhan guru besar Ilmu Sosiologi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada Desember 2019.

Dalam pidato pengukuhan Guru Besar Ilmu Sosiologi UMY berjudul *Moderasi Indonesia dan Keindonesiaan Perspektif Sosiologi*, Haedar Nashir menekankan bahwa dalam konteks kehidupan kebangsaan, moderasi adalah jalan tengah yang mampu menghindarkan masyarakat dari ekstremitas, baik radikal maupun liberal. Moderasi, menurutnya, merupakan sarana untuk mengembalikan Indonesia pada jati dirinya dengan seluruh dimensi keindonesiaan yang kaya dan beragam (Nashir, n.d.).

Prinsip Washatiyah dalam Gerakan Muhammadiyah

Prinsip *washatiyah* atau moderasi merupakan salah satu fondasi utama gerakan Muhammadiyah sejak awal kelahirannya. Akar ajaran ini bersumber dari Al-Qur'an yang menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasathan*—umat pertengahan—yang ditugaskan menjadi saksi bagi manusia (QS. Al-Baqarah: 143). Dalam konteks Muhammadiyah, *washatiyah* dipahami sebagai sikap keseimbangan: teguh memegang ajaran Islam, tetapi tetap terbuka terhadap dialog, ilmu pengetahuan, dan dinamika zaman (Nashir, 2019).

K.H. Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah mencontohkan prinsip *washatiyah* dalam praktik dakwahnya. Ia tidak menolak tradisi lokal secara total, tetapi menyeleksi mana yang sesuai dengan ajaran Islam dan mana yang perlu diluruskan. Dengan cara ini, Muhammadiyah tampil sebagai gerakan yang tidak ekstrem dalam menolak budaya, tetapi juga tidak kompromistis dalam hal akidah. Pendekatan moderat ini

membuat Muhammadiyah mampu diterima luas oleh masyarakat dengan latar budaya beragam (Noer, 1996).

Prinsip *washatiyah* dalam Muhammadiyah tercermin pula dalam pola pendidikan. Sekolah-sekolah Muhammadiyah sejak awal mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum. Bagi Muhammadiyah, pendidikan agama tidak boleh mengasingkan peserta didik dari ilmu pengetahuan modern, sebaliknya ilmu umum harus diarahkan untuk memperkuat keimanan dan kemaslahatan sosial. Inilah bentuk moderasi epistemologis yang menolak dikotomi antara ilmu agama dan ilmu duniawi (Azra, 2016).

Di bidang dakwah, *washatiyah* membuat Muhammadiyah menolak kekerasan sebagai metode perjuangan. Dakwah Muhammadiyah selalu menekankan rasionalitas, dialog, dan keteladanan. Kritik terhadap praktik keagamaan yang dianggap menyimpang tidak dilakukan dengan cara konfrontatif, tetapi melalui edukasi, pembinaan, dan diskusi yang mencerahkan. Hal ini memperlihatkan wajah Islam yang damai, inklusif, dan penuh welas asih.

Prinsip *washatiyah* juga tampak dalam sikap Muhammadiyah terhadap negara. Sejak era pergerakan nasional hingga kini, Muhammadiyah mendukung negara bangsa (nation-state) Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Muhammadiyah tidak terjebak pada wacana negara agama, tetapi melihat Pancasila sebagai konsensus nasional yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dengan sikap moderat ini, Muhammadiyah berhasil menempatkan diri sebagai kekuatan moral bangsa tanpa kehilangan identitas keagamaannya (Alfian, 1989).

Dalam konteks sosial, *washatiyah* mengarahkan Muhammadiyah untuk terlibat aktif dalam isu-isu kemanusiaan. Muhammadiyah tidak hanya membela kepentingan umat Islam, tetapi juga semua warga bangsa. Rumah sakit Muhammadiyah, misalnya, tidak pernah menolak pasien non-Muslim; sekolah Muhammadiyah terbuka untuk semua anak bangsa. Sikap ini

menegaskan bahwa dakwah Muhammadiyah berlandaskan pada nilai kemanusiaan universal, bukan eksklusivisme kelompok.

Di era globalisasi, prinsip *washatiyah* semakin relevan. Gelombang radikalisme, intoleransi, dan politik identitas menuntut kehadiran gerakan Islam yang mampu menjadi penyeimbang. Muhammadiyah hadir dengan narasi Islam yang rasional, moderat, dan progresif. Melalui jaringan pendidikan dan sosialnya yang luas, Muhammadiyah menyebarkan nilai *washatiyah* ke seluruh pelosok negeri, bahkan hingga ke tingkat global melalui kerja sama internasional.

Namun, *washatiyah* bukan berarti netral tanpa sikap. Muhammadiyah tetap tegas menolak segala bentuk kemungkaran, ketidakadilan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Moderasi di sini bukan kompromi terhadap nilai kebenaran, melainkan strategi untuk menegakkan Islam dengan cara yang bijak, damai, dan sesuai dengan semangat zaman.

Dengan demikian, prinsip *washatiyah* dalam Muhammadiyah adalah jantung gerakan dakwah yang mencerahkan. Ia memungkinkan Muhammadiyah tampil sebagai gerakan Islam yang kokoh dalam akidah, tetapi lentur dalam pendekatan; kuat dalam prinsip, tetapi lembut dalam metode. Inilah warisan intelektual dan spiritual yang menjadikan Muhammadiyah tetap relevan lebih dari satu abad lamanya.

Implementasi dakwah Muhammadiyah dapat dipahami sebagai upaya mengembalikan dimensi keindonesiaan bangsa. Penerapan dakwah moderat menjadi langkah strategis untuk menjawab tiga problem utama dakwah di Indonesia, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Gerakan pencerahan yang dijalankan Muhammadiyah menekankan pada nilai perdamaian serta penolakan terhadap segala bentuk kekerasan. Landasan dakwah ini berakar pada Q.S. An-Nahl: 125 dan semangat *Iqra'*, yang mendorong umat untuk melawan

radikalisme serta ekstremisme yang berpotensi merusak keragaman masyarakat Indonesia.

Dengan menjadikan semangat *Iqra'* sebagai inspirasi, Muhammadiyah mengembangkan metode dakwah yang bertujuan membentuk bangsa yang cerdas sekaligus terhindar dari bahaya radikalisme-ekstremisme. Melalui pendekatan moderat, Muhammadiyah berupaya menjaga heterogenitas masyarakat Indonesia agar tetap harmonis. Dakwah yang diusung bukan sekadar menyampaikan pesan agama, tetapi juga mendorong pencerahan peradaban, di mana dialog kebangsaan terus dihidupkan di ruang publik untuk menyatukan perbedaan dengan damai.

Komitmen ini sejalan dengan warisan pemikiran Ahmad Syafi'i Ma'arif sebagai guru bangsa, yang menekankan pentingnya menyebarkan dakwah kebangsaan di ruang publik. Harapannya, nilai kehangatan Islam sebagai *Rahmatan lil 'Alamin* benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Muhammadiyah pun mengadopsi konsep tindakan komunikatif sebagaimana digagas oleh Jürgen Habermas, agar problematika keagamaan dapat dicarikan solusi dalam berbagai dimensinya. Dengan demikian, dakwah moderat Muhammadiyah dapat dipandang sebagai reformulasi dakwah kebangsaan, sebuah konsep progresif secara sosiokultural yang mampu merangkul seluruh elemen masyarakat dalam bingkai kebhinekaan Indonesia.

Dalam kerangka kebhinekaan, dakwah memang sebaiknya dijalankan dengan cara yang bijak. Penyampaian pesan moderasi beragama harus mudah dipahami dan menyentuh masyarakat luas. Hal ini ditegaskan oleh Prof. Dr. H. Sudarman dalam bukunya *Moderasi Beragama Sudut Pandang Orang Muhammadiyah*, yang mengingatkan bahwa pada Musyawarah Nasional MUI tahun 2015 telah dirumuskan 12 prinsip *wasathiyyat al-Islam* sebagai pedoman berislam secara moderat (Sudarman, 2023), yakni:

- Tawassut (mengambil jalan tengah)

- Tawazun (berkesinambungan)
- I'tidal (lurus dan tegas)
- Tasamuh (toleransi)
- Musawah (egaliter)
- Syura (musyawarah)
- Ishlah (reformasi)
- Aulawiyah (mendahulukan yang prioritas)
- Tatawwur wa ibtikar (dinamis dan inovatif)
- Tahadhdhur (berkeadaban)
- Wathaniyah wa muwathanah (penerimaan eksistensi negara bangsa)
- Qudwatiyah (kepeloporan dalam kebaikan).

Struktur dan Peran Elit Muhammadiyah di Tingkat Lokal

Salah satu keunggulan Muhammadiyah sebagai organisasi modern adalah struktur kelembagaannya yang rapi, mulai dari tingkat pusat hingga akar rumput. Struktur ini memungkinkan Muhammadiyah menjalankan dakwah dan amal usaha secara sistematis serta menjangkau masyarakat luas. Di tingkat lokal, keberadaan pimpinan cabang, ranting, hingga kelompok majelis dan lembaga menjadi ujung tombak dakwah Muhammadiyah.

Struktur organisasi Muhammadiyah bersifat kolektif-kolegial. Artinya, keputusan tidak ditentukan oleh satu orang, melainkan melalui musyawarah bersama. Pola ini membedakan Muhammadiyah dari organisasi berbasis karismatik yang bertumpu pada figur tunggal. Dengan sistem kolektif-kolegial, Muhammadiyah mengedepankan prinsip demokrasi internal yang memberi ruang partisipasi luas bagi anggotanya. Hal ini membuat gerakan Muhammadiyah lebih berkelanjutan, karena tidak tergantung pada figur tertentu (Alfian, 1989).

Di tingkat lokal, elit Muhammadiyah memainkan peran penting sebagai penghubung antara organisasi dan masyarakat. Mereka biasanya terdiri atas tokoh agama, pendidik, pengusaha, hingga profesional yang memiliki legitimasi moral di lingkungannya. Elit-elit ini tidak hanya berperan dalam mengelola amal usaha, tetapi juga menjadi panutan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan pribadi mereka yang sederhana, konsisten, dan dekat dengan masyarakat membuat pesan dakwah lebih mudah diterima.

Peran elit lokal Muhammadiyah juga sangat terasa dalam bidang pendidikan. Banyak sekolah Muhammadiyah di daerah-daerah kecil yang dikelola oleh pimpinan cabang dan ranting dengan sumber daya terbatas. Namun, berkat dedikasi para elit lokal, sekolah-sekolah tersebut tetap bertahan bahkan berkembang, menjadi pusat pendidikan Islam modern bagi masyarakat sekitar. Hal yang sama juga berlaku pada amal usaha kesehatan seperti klinik dan rumah sakit kecil di daerah.

Selain mengelola amal usaha, elit Muhammadiyah lokal berfungsi sebagai agen perubahan sosial. Mereka aktif dalam forum-forum kemasyarakatan, terlibat dalam penyelesaian konflik, serta mendorong budaya gotong royong dan toleransi. Dalam banyak kasus, elit Muhammadiyah menjadi mediator yang menengahi perselisihan antarwarga, baik terkait masalah sosial maupun keagamaan. Dengan demikian, mereka menjalankan fungsi dakwah bukan hanya di masjid, tetapi juga di ruang publik.

Struktur lokal Muhammadiyah juga memungkinkan gerakan ini lebih responsif terhadap isu-isu aktual. Misalnya, ketika terjadi bencana alam, elit Muhammadiyah lokal segera menggerakkan jaringan relawan dan amal usaha untuk memberikan bantuan. Kesiapan ini membuat Muhammadiyah dikenal sebagai salah satu organisasi masyarakat yang paling cepat tanggap terhadap bencana, baik di tingkat nasional maupun lokal (Burhani, 2016).

Namun, tantangan juga dihadapi elit Muhammadiyah di tingkat lokal. Keterbatasan dana, minimnya sumber daya manusia, dan pengaruh politik praktis sering menjadi hambatan. Meski demikian, dedikasi yang kuat membuat mereka tetap konsisten menjalankan amanah dakwah. Banyak di antara elit lokal yang bekerja secara sukarela tanpa imbalan finansial, semata-mata demi pengabdian kepada umat dan bangsa.

Dari perspektif dakwah moderasi, elit Muhammadiyah lokal memainkan peran strategis. Mereka yang setiap hari berinteraksi dengan masyarakat memiliki peluang besar untuk menanamkan nilai-nilai *washatiyah* (keseimbangan). Melalui khutbah, pengajian, pendidikan, dan kegiatan sosial, mereka menyebarkan pesan Islam yang toleran, inklusif, dan damai. Dengan cara ini, Muhammadiyah berkontribusi langsung dalam merawat kohesi sosial di tingkat akar rumput.

Dengan demikian, struktur dan peran elit Muhammadiyah di tingkat lokal adalah fondasi yang membuat organisasi ini kokoh dan berdaya tahan. Tanpa dedikasi elit lokal, dakwah Muhammadiyah tidak akan bisa menjangkau masyarakat luas. Justru dari tangan mereka, nilai-nilai moderasi, kepedulian sosial, dan dakwah mencerahkan menemukan bentuk nyatanya dalam kehidupan sehari-hari umat.

Muhammadiyah dan Politik Kebangsaan

Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah bukanlah organisasi politik, melainkan gerakan dakwah dan sosial-keagamaan. Namun, Muhammadiyah tidak menutup mata terhadap politik kebangsaan. Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, Muhammadiyah ikut terlibat dalam perjuangan kemerdekaan, perumusan dasar negara, hingga pembangunan bangsa pasca merdeka. Sikap Muhammadiyah terhadap politik kebangsaan dapat dirangkum sebagai keterlibatan moral dan kultural, bukan keterlibatan praktis elektoral (Alfian, 1989).

Pada masa pergerakan nasional, tokoh-tokoh Muhammadiyah aktif berkontribusi dalam arena politik kebangsaan. Sebut saja Ki Bagus Hadikusumo, yang berperan dalam perumusan dasar negara Indonesia, termasuk dalam perdebatan seputar Piagam Jakarta. Muhammadiyah memandang Pancasila sebagai konsensus nasional yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan sejalan dengan nilai-nilai universal yang diajarkan agama. Sikap ini menegaskan bahwa Muhammadiyah adalah kekuatan yang mendukung negara bangsa (nation-state), bukan menuntut negara agama (Noer, 1996).

Dalam perjalanan sejarah, Muhammadiyah juga memiliki pengalaman mendirikan partai politik, yakni Partai Masyumi pada tahun 1945. Masyumi menjadi salah satu kekuatan politik besar pada masa awal kemerdekaan, dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah memainkan peran penting di dalamnya. Namun, setelah pembubaran Masyumi oleh Presiden Soekarno pada 1960, Muhammadiyah menegaskan kembali posisinya sebagai gerakan dakwah, bukan partai politik. Sejak itu, Muhammadiyah berusaha menjaga jarak dari politik praktis, meskipun anggotanya tetap bebas berkiprah di partai mana pun sesuai pilihannya.

Sikap politik Muhammadiyah pasca pembubaran Masyumi dapat digambarkan sebagai politik moral. Muhammadiyah tidak terjun langsung ke gelanggang kekuasaan, tetapi memberikan panduan etis bagi bangsa. Politik moral ini diwujudkan melalui pernyataan sikap resmi, advokasi kebijakan publik, hingga kritik konstruktif terhadap pemerintah. Dengan cara ini, Muhammadiyah tetap berperan dalam politik kebangsaan tanpa harus kehilangan identitasnya sebagai gerakan dakwah dan sosial (Nashir, 2010).

Keterlibatan Muhammadiyah dalam politik kebangsaan juga terlihat melalui kiprah amal usahanya. Pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan sosial yang dijalankan Muhammadiyah bukan hanya bentuk dakwah, tetapi juga

kontribusi politik kebangsaan dalam arti luas. Dengan membangun sekolah dan universitas, Muhammadiyah mencetak generasi cerdas yang menjadi pemimpin bangsa. Dengan mendirikan rumah sakit, Muhammadiyah memperkuat fondasi kesejahteraan rakyat. Dengan memberdayakan masyarakat, Muhammadiyah menegakkan pilar keadilan sosial.

Dalam konteks demokrasi modern, Muhammadiyah berusaha menjaga posisi sebagai penyeimbang. Organisasi ini tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu, tetapi anggotanya tersebar di berbagai partai. Hal ini sering menimbulkan dinamika internal, tetapi juga menjadi bukti bahwa Muhammadiyah tidak memaksakan pilihan politik tunggal bagi warganya. Yang dijaga adalah prinsip: siapa pun yang berpolitik, harus menjunjung tinggi etika, keadilan, dan persatuan bangsa.

Peran Muhammadiyah dalam politik kebangsaan semakin relevan di tengah maraknya politik identitas. Muhammadiyah konsisten menolak penggunaan agama sebagai alat untuk memecah belah masyarakat. Sebaliknya, Muhammadiyah mendorong agar agama menjadi sumber moralitas politik, bukan instrumen perebutan kekuasaan. Dengan posisi ini, Muhammadiyah berkontribusi menjaga kohesi nasional di tengah polarisasi politik yang kerap terjadi.

Di tingkat lokal, elit Muhammadiyah juga memainkan peran politik kebangsaan melalui partisipasi aktif dalam musyawarah pembangunan daerah, forum kerukunan umat beragama, dan lembaga-lembaga publik. Kehadiran mereka memastikan bahwa nilai-nilai keadilan, moderasi, dan keberpihakan pada rakyat kecil selalu hadir dalam proses kebijakan publik. Dengan demikian, politik kebangsaan Muhammadiyah tidak hanya berlangsung di level nasional, tetapi juga di akar rumput.

Dengan demikian, Muhammadiyah menunjukkan bahwa politik kebangsaan tidak harus diartikan sebagai perebutan kekuasaan. Politik bisa dijalankan sebagai pengabdian moral,

sosial, dan kultural bagi bangsa. Inilah politik kebangsaan ala Muhammadiyah: menolak politik praktis yang sempit, tetapi tetap memberikan kontribusi besar dalam menjaga keutuhan, persatuan, dan kemajuan Indonesia.

Bab 3

Memahami Moderasi Beragama dari Perspektif Islam dan Muhammadiyah

Dasar Al-Qur'an dan Hadis

Konsep moderasi beragama dalam Islam tidak lahir dari ruang hampa, melainkan berakar langsung pada sumber utama ajaran Islam: Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an menggunakan istilah *ummatan wasathan* dalam QS. Al-Baqarah: 143 untuk menyebut umat Islam sebagai umat pertengahan. Para mufasir klasik seperti Al-Tabari menafsirkan istilah *wasath* sebagai keadilan dan keseimbangan—yakni sikap yang tidak condong pada ekstremitas, baik berlebihan maupun lalai. Dengan demikian, sejak awal, Al-Qur'an sudah menegaskan bahwa umat Islam diposisikan sebagai komunitas moderat yang menjadi teladan bagi manusia lainnya (Al-Qaradawi, 2010).

Ayat ini penting karena memberi identitas teologis bagi umat Islam. Islam bukanlah agama yang mengajarkan ekstremisme, melainkan agama yang menjunjung keseimbangan dalam ibadah, muamalah, maupun hubungan sosial. Moderasi bukan sekadar pilihan metodologis, tetapi sebuah mandat keagamaan yang melekat pada umat Islam. Identitas *ummatan wasathan* menuntut umat Islam untuk bersikap adil, inklusif, dan menjaga harmoni dalam kehidupan sosial.

Selain QS. Al-Baqarah: 143, Al-Qur'an juga banyak menekankan pentingnya berlaku adil (*i'tidal*). QS. An-Nahl: 90 misalnya, menegaskan bahwa Allah memerintahkan umat manusia untuk berbuat adil dan ihsan. Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan adalah fondasi kehidupan beragama sekaligus kehidupan bermasyarakat. Moderasi, dalam hal ini, merupakan pengejawantahan dari keadilan: tidak menindas, tidak diskriminatif, dan selalu mengedepankan keseimbangan.

Hadis Nabi Muhammad SAW pun banyak menekankan pentingnya jalan tengah dalam beragama. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menegur sekelompok sahabat yang beribadah secara ekstrem—ada yang berpuasa terus-menerus, ada yang tidak menikah, ada yang salat tanpa henti.

Rasulullah menegaskan bahwa beliau berpuasa sekaligus berbuka, salat sekaligus tidur, dan tetap menikah. Dari teladan ini, terlihat jelas bahwa Islam mengajarkan keseimbangan, bukan asketisme yang berlebihan.

Moderasi dalam hadis juga tampak pada ajaran untuk mempermudah agama dan tidak memberatkan. Dalam sebuah riwayat, Nabi bersabda: “*Mudahkanlah dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari*” (HR. Bukhari). Prinsip ini sejalan dengan semangat moderasi: agama seharusnya membawa kedamaian, kegembiraan, dan kemudahan, bukan rasa takut atau penindasan.

Selain itu, Rasulullah juga mencontohkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Piagam Madinah, yang beliau rumuskan sebagai dasar hidup bersama di kota Madinah, merupakan dokumen historis yang menegaskan pentingnya moderasi. Dalam piagam tersebut, berbagai komunitas agama—Muslim, Yahudi, dan lainnya—diakui hak dan kewajibannya, serta dijamin hidup berdampingan secara damai. Hal ini memperlihatkan bahwa toleransi dan penghormatan terhadap keragaman adalah bagian integral dari ajaran Islam.

Dalam tradisi ulama, dasar-dasar Qur’ani dan hadis ini kemudian dikembangkan menjadi konsep *wasathiyyah* (moderasi). Ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi menegaskan bahwa *wasathiyyah* adalah karakter utama Islam, yang menjadi solusi di tengah dua kutub ekstrem: liberalisme yang melemahkan agama, dan radikalisme yang menafsirkan agama secara kaku. Islam moderat berarti teguh dalam prinsip, tetapi fleksibel dalam metode; kuat dalam akidah, tetapi inklusif dalam interaksi sosial.

Dengan demikian, moderasi beragama dalam Islam memiliki legitimasi normatif yang sangat kuat. Ia bukan produk Barat, bukan pula kompromi politik, melainkan ajaran asli Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan hadis. Konsep ini menjadi panduan agar umat Islam tetap berada di jalan tengah, mampu

menjaga keseimbangan, dan memberi teladan kebaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nilai Inti: *Tawassuth*, *I'tidal*, *Tasamuh*, *Ishlah*

Konsep moderasi beragama dalam Islam bukan sekadar wacana abstrak, melainkan memiliki nilai inti yang menuntun praktik kehidupan umat. Empat nilai utama yang menjadi pilar moderasi adalah *tawassuth* (sikap tengah), *i'tidal* (keadilan), *tasamuh* (toleransi), dan *ishlah* (perbaikan). Keempat nilai ini saling terkait, membentuk fondasi untuk membangun kehidupan beragama yang damai, adil, dan konstruktif di tengah keberagaman masyarakat.

Pertama, *tawassuth* atau sikap pertengahan. Nilai ini berarti menolak segala bentuk ekstremisme, baik dalam beragama maupun dalam kehidupan sosial. *Tawassuth* tidak berarti kompromi tanpa prinsip, tetapi memilih jalan seimbang antara dua kutub yang berlebihan. Dalam konteks beragama, sikap ini mencegah lahirnya fanatisme buta sekaligus mencegah relativisme yang mengikis keyakinan. Rasulullah SAW mencontohkan *tawassuth* dengan gaya hidupnya yang sederhana, seimbang antara ibadah dan aktivitas duniawi (Al-Qaradawi, 2010).

Kedua, *i'tidal* yang bermakna keadilan. Islam menekankan bahwa keadilan adalah pondasi kehidupan. QS. Al-Maidah: 8 menegaskan agar manusia berlaku adil bahkan terhadap orang yang tidak disukai. Dalam konteks moderasi beragama, *i'tidal* mendorong umat untuk memperlakukan sesama secara setara tanpa diskriminasi. Nilai ini sangat relevan dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, di mana keadilan menjadi kunci menjaga harmoni sosial. Dengan keadilan, umat beragama tidak terjebak dalam eksklusivisme, tetapi mengakui hak-hak orang lain.

Ketiga, *tasamuh* atau toleransi. Islam mengajarkan penghormatan terhadap perbedaan. QS. Al-Kafirun: 6

menegaskan prinsip “bagimu agamamu, bagiku agamaku” sebagai dasar hubungan lintas iman. Toleransi tidak berarti melemahkan akidah, tetapi membuka ruang untuk saling menghargai. Dalam sejarahnya, Rasulullah SAW memberikan teladan dengan mengizinkan komunitas Yahudi dan Nasrani hidup damai di Madinah. Bagi Muhammadiyah maupun gerakan Islam moderat lainnya, *tasamuh* menjadi pilar penting dalam dakwah inklusif dan kebangsaan.

Keempat, *ishlah* atau perbaikan. Nilai ini mengandung semangat transformasi sosial. Moderasi beragama bukan sekadar menjaga status quo, melainkan mendorong perbaikan menuju kehidupan yang lebih baik. Al-Qur’an menekankan pentingnya *ishlah* dalam penyelesaian konflik (QS. Al-Hujurat: 10), di mana perdamaian dan rekonsiliasi menjadi jalan utama. Nilai ini mengajarkan umat Islam untuk aktif membangun masyarakat, memperbaiki kelemahan, dan mencegah kerusakan sosial.

Keempat nilai inti ini saling menguatkan. *Tawassuth* menuntun umat agar tidak berlebihan; *i’tidal* memastikan bahwa setiap orang mendapat perlakuan adil; *tasamuh* membuka ruang dialog dan keberagaman; sementara *ishlah* mendorong aksi nyata untuk perbaikan. Jika salah satunya diabaikan, moderasi bisa kehilangan makna. Misalnya, tanpa keadilan, toleransi hanya akan menjadi slogan; tanpa semangat perbaikan, sikap tengah akan jatuh pada stagnasi.

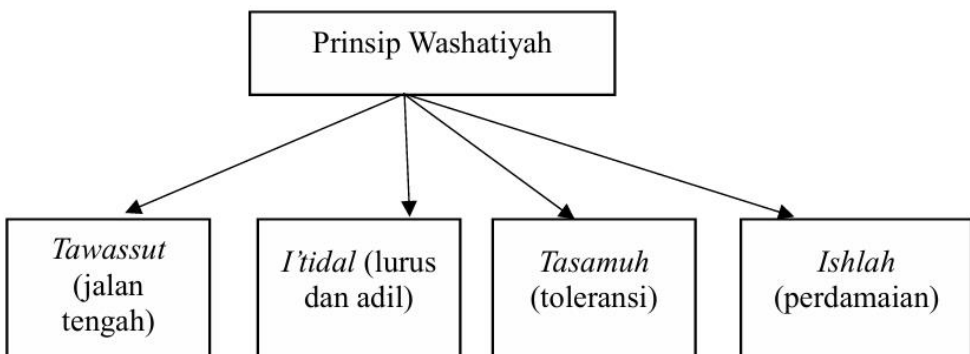
Dalam praktik kehidupan beragama di Indonesia, nilai-nilai inti ini sangat relevan. Keberagaman agama, etnis, dan budaya menuntut umat Islam untuk selalu menjaga keseimbangan. *Tawassuth* mencegah radikalisme, *i’tidal* melawan diskriminasi, *tasamuh* merawat kerukunan, dan *ishlah* mendorong pembangunan bersama. Oleh karena itu, moderasi beragama tidak boleh berhenti pada retorika, tetapi harus terwujud dalam sikap dan tindakan nyata sehari-hari.

Nilai inti moderasi juga memperlihatkan bahwa Islam sejatinya adalah agama peradaban. Dengan mengedepankan

jalan tengah, keadilan, toleransi, dan perbaikan, Islam hadir bukan sebagai ancaman, melainkan solusi bagi kehidupan manusia. Moderasi bukanlah upaya melemahkan agama, tetapi justru jalan untuk menegakkan ajaran Islam yang rahmatan lil 'alamin.

Dengan demikian, moderasi beragama dapat dipahami sebagai praktik hidup yang berakar pada empat nilai inti ini. *Tawassuth*, *i'tidal*, *tasamuh*, dan *ishlah* bukan hanya konsep normatif, melainkan pedoman etis untuk menjawab tantangan zaman, membangun peradaban, dan memperkokoh kehidupan berbangsa yang damai dan harmonis.

Para pemimpin Muhammadiyah di Surabaya memandang moderasi bukan sebagai sikap kompromistis yang melemahkan keyakinan, melainkan sebagai wujud dari iman yang kokoh serta keterbukaan dalam membangun hubungan sosial. Pandangan ini berakar kuat pada karakter Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh umat manusia. Seperti yang ditegaskan oleh Dr. Mulyono bersama tokoh-tokoh elit Muhammadiyah Surabaya lainnya, sikap moderat tersebut dapat dipetakan sebagaimana terlihat pada gambar berikut.



Prinsip, Indikator, dan Fungsi Moderasi Beragama

Moderasi beragama bukan sekadar slogan, melainkan sebuah paradigma yang memiliki prinsip, indikator, dan fungsi jelas dalam kehidupan umat Islam. Dengan memahami ketiganya, moderasi dapat dijalankan secara lebih terarah dan tidak berhenti pada tataran retorika. Prinsip menunjukkan landasan filosofisnya, indikator menjadi ukuran keberhasilan, sementara fungsi menggambarkan kontribusinya bagi kehidupan individu maupun masyarakat.

Prinsip pertama dari moderasi beragama adalah komitmen terhadap keadilan dan keseimbangan. Al-Qur'an berulang kali menekankan pentingnya berlaku adil, bahkan kepada pihak yang berbeda keyakinan (QS. Al-Maidah: 8). Dalam konteks moderasi, prinsip ini berarti tidak berpihak pada ekstremisme kanan yang cenderung kaku dan eksklusif, maupun ekstremisme kiri yang mengabaikan nilai agama. Umat Islam dituntut berada di jalan tengah yang adil dan proporsional (Al-Qaradawi, 2010).

Prinsip kedua adalah mengutamakan maslahat (kebaikan umum). Moderasi tidak boleh dilepaskan dari tujuan syariat (maqashid al-syari'ah), yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan mengedepankan maslahat, moderasi tidak hanya berorientasi pada kepentingan kelompok tertentu, tetapi memberi manfaat luas bagi seluruh umat manusia. Prinsip ini juga membuat moderasi bersifat fleksibel, mampu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran pokok Islam.

Prinsip ketiga adalah menghargai perbedaan. Islam sejak awal mengakui adanya keragaman sebagai bagian dari sunnatullah (QS. Al-Hujurat: 13). Moderasi tidak berupaya meniadakan perbedaan, melainkan mengelolanya agar menjadi rahmat. Prinsip ini sangat relevan dalam masyarakat

multikultural seperti Indonesia, di mana keragaman agama, etnis, dan budaya adalah realitas yang tidak bisa dihindari.

Dari prinsip-prinsip tersebut lahirlah indikator moderasi beragama yang dapat dijadikan tolok ukur. Kementerian Agama RI (2019) menyebut empat indikator utama: komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Indikator ini menunjukkan bahwa moderasi bukan hanya wacana teologis, tetapi juga praksis sosial-politik. Misalnya, seorang Muslim yang moderat tidak hanya taat beragama, tetapi juga mendukung Pancasila, menghargai perbedaan, menolak radikalisme, dan mampu berdialog dengan budaya lokal.

Selain itu, indikator moderasi juga bisa dilihat dari pola pikir, sikap, dan perilaku sehari-hari. Moderat berarti berpikir terbuka, tidak mudah mengkafirkan orang lain, serta menampilkan wajah Islam yang ramah. Dalam kehidupan sosial, indikator moderasi tampak dari kemauan untuk bekerja sama lintas agama, membangun solidaritas sosial, serta mengedepankan dialog daripada konflik.

Fungsi utama moderasi beragama adalah menjaga keseimbangan. Moderasi berfungsi sebagai penengah antara dua kecenderungan ekstrem yang bisa merusak kehidupan beragama. Dengan moderasi, umat Islam tetap kokoh dalam keyakinan, tetapi tidak menutup diri terhadap perubahan zaman. Moderasi juga berfungsi mencegah perpecahan internal umat yang kerap dipicu perbedaan tafsir.

Fungsi lainnya adalah membangun harmoni sosial. Dalam masyarakat majemuk, moderasi menjadi perekat yang menjaga kerukunan. Moderasi memungkinkan umat beragama hidup berdampingan secara damai tanpa harus mengorbankan keyakinan masing-masing. Dengan fungsi ini, moderasi berperan langsung dalam menjaga persatuan bangsa.

Fungsi ketiga adalah menghadirkan Islam sebagai rahmatan lil 'alamin. Islam moderat memberi wajah yang ramah, solutif, dan penuh kasih sayang. Fungsi ini sangat

penting dalam konteks global, di mana Islam sering kali disalahpahami sebagai agama yang identik dengan kekerasan. Dengan menampilkan moderasi, umat Islam menunjukkan bahwa agamanya adalah sumber perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan universal.

Dengan demikian, moderasi beragama memiliki prinsip yang kokoh, indikator yang jelas, dan fungsi yang nyata. Ia bukan sekadar jargon politik atau proyek sosial, melainkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Pemahaman yang utuh atas ketiga aspek ini akan memastikan bahwa moderasi benar-benar menjadi pedoman hidup, bukan sekadar wacana normatif.

Moderasi dalam Dakwah

Dakwah merupakan inti dari aktivitas keagamaan umat Islam. Namun, cara berdakwah sering kali menentukan apakah pesan Islam dapat diterima dengan baik atau justru menimbulkan resistensi. Dalam konteks ini, moderasi menjadi kunci penting agar dakwah tidak terjebak dalam ekstremitas: terlalu kaku hingga menakutkan, atau terlalu longgar hingga kehilangan substansi. Moderasi dalam dakwah berarti menghadirkan Islam yang ramah, inklusif, dan solutif sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan teladan Rasulullah SAW.

Al-Qur'an memberikan pedoman jelas mengenai metode dakwah. QS. An-Nahl: 125 menegaskan, *"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, nasihat yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik."* Ayat ini menunjukkan bahwa dakwah harus disampaikan dengan kebijaksanaan, penuh etika, dan tanpa kekerasan. Moderasi hadir melalui penggunaan pendekatan persuasif yang menekankan nilai kebaikan, bukan melalui paksaan atau intimidasi.

Dalam sejarah Nabi Muhammad SAW, kita mendapati contoh nyata moderasi dalam dakwah. Rasulullah tidak pernah memaksakan agama kepada siapapun, melainkan menampilkan

akhlak mulia yang menginspirasi orang untuk masuk Islam. Ketika menghadapi perlawanan, Rasulullah lebih memilih jalur perdamaian dan dialog daripada peperangan, kecuali jika umat Islam benar-benar diserang. Teladan ini menunjukkan bahwa moderasi adalah strategi dakwah yang sesuai dengan misi Islam sebagai rahmatan lil 'alamin.

Moderasi dalam dakwah juga tercermin dari sikap mengakomodasi budaya lokal. Islam datang ke Nusantara bukan dengan pedang, melainkan dengan dakwah damai yang memadukan nilai Islam dengan tradisi setempat. Para ulama dan mubaligh awal menyampaikan ajaran Islam melalui pendekatan budaya: seni, perdagangan, hingga pernikahan. Keberhasilan dakwah Islam di Indonesia membuktikan bahwa pendekatan moderat jauh lebih efektif daripada cara-cara konfrontatif (Azra, 2002).

Dalam konteks kekinian, dakwah moderat berarti menghadirkan Islam yang relevan dengan problem masyarakat. Dakwah tidak hanya berbicara soal ibadah ritual, tetapi juga menyentuh isu-isu sosial seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan keadilan. Dengan demikian, dakwah menjadi sarana transformasi sosial yang menjawab kebutuhan nyata umat. Moderasi dalam dakwah berarti menjaga keseimbangan antara dimensi spiritual dan dimensi sosial-kehidupan sehari-hari.

Moderasi juga berarti menolak gaya dakwah yang eksklusif atau penuh ujaran kebencian. Fenomena ceramah provokatif yang mengkafirkan kelompok lain, merendahkan agama lain, atau menebar permusuhan adalah antitesis dari dakwah moderat. Dakwah yang sejati justru membangun dialog, memperkuat ukhuwah, dan menumbuhkan semangat persaudaraan kemanusiaan. Dengan cara ini, dakwah dapat memperkokoh kohesi sosial di tengah masyarakat yang beragam.

Lebih jauh, dakwah moderat juga penting di era digital. Media sosial menjadi ruang dakwah baru, tetapi sekaligus

rentan terhadap penyebaran radikalisme. Para dai dan aktivis dakwah dituntut untuk menghadirkan konten yang sejuk, edukatif, dan mencerahkan. Moderasi dalam dakwah digital berarti memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan Islam yang rahmah, bukan untuk memperuncing perpecahan atau menebar kebencian.

Dengan demikian, moderasi dalam dakwah adalah sebuah keniscayaan. Ia menuntun para dai agar menyampaikan Islam dengan bijak, menyesuaikan diri dengan konteks sosial, dan tetap setia pada nilai-nilai universal Islam. Moderasi menjadikan dakwah sebagai jalan pencerahan, bukan jalan perpecahan. Di tengah dunia yang semakin plural dan kompleks, hanya dakwah yang moderatlah yang mampu menjaga Islam tetap hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Tantangan di Masyarakat Multikultural

Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat kemajemukan paling tinggi di dunia. Keberagaman agama, suku, etnis, bahasa, dan budaya menjadikan Indonesia sebagai mozaik sosial yang indah, tetapi sekaligus kompleks. Dalam masyarakat multikultural semacam ini, moderasi beragama menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Moderasi dibutuhkan untuk merawat harmoni, tetapi ia juga terus diuji oleh berbagai faktor politik, ekonomi, sosial, bahkan global.

Tantangan pertama datang dari radikalisme dan intoleransi. Meski bukan arus utama, ideologi radikal masih menemukan ruang di tengah masyarakat. Kelompok radikal sering menggunakan sentimen agama untuk memperkuat identitas kelompok, bahkan kadang melakukan kekerasan atas nama agama. Hal ini berbahaya karena dapat merusak tatanan kebangsaan yang dibangun di atas semangat persatuan. Dalam konteks ini, moderasi beragama berfungsi sebagai penangkal—meluruskan pemahaman yang keliru dan menampilkan wajah Islam yang damai (Bruinessen, 2013).

Tantangan kedua adalah politik identitas. Dalam beberapa kontestasi politik, agama sering dijadikan alat mobilisasi massa. Politik identitas yang sempit tidak hanya memecah belah umat beragama, tetapi juga merusak demokrasi. Moderasi beragama harus berhadapan dengan fenomena ini dengan cara menegaskan kembali bahwa agama bukan instrumen perebutan kekuasaan, melainkan sumber nilai moral yang membimbing politik agar adil dan bermartabat (Mietzner & Muhtadi, 2020).

Tantangan ketiga adalah ketidakadilan sosial dan ekonomi. Kesenjangan yang tajam antara kaya dan miskin sering kali melahirkan rasa ketidakpuasan yang bisa dieksploitasi kelompok ekstrem. Dalam kondisi demikian, dakwah moderat dituntut tidak hanya berbicara soal ibadah, tetapi juga menyentuh isu-isu kesejahteraan sosial. Moderasi beragama harus hadir sebagai gerakan pembelaan terhadap kelompok lemah, agar mereka tidak mudah terjerumus pada narasi radikal yang menjanjikan solusi instan.

Selain itu, masyarakat multikultural juga menghadapi tantangan dari globalisasi dan arus informasi digital. Media sosial sering kali menjadi arena subur bagi ujaran kebencian, hoaks, dan propaganda intoleran. Generasi muda yang aktif di dunia digital rentan terpapar paham ekstrem jika tidak memiliki literasi agama yang memadai. Oleh karena itu, moderasi beragama perlu diproyeksikan ke ruang digital dengan menghadirkan konten yang edukatif, sejuk, dan membangun kesadaran kritis (Syafuruddin, 2020).

Tantangan lainnya adalah konservatisme internal umat Islam sendiri. Tidak jarang, perbedaan mazhab atau aliran justru menjadi sumber konflik internal. Misalnya, perdebatan seputar praktik ibadah tertentu dapat menimbulkan saling klaim kebenaran yang eksklusif. Moderasi beragama di sini berfungsi sebagai pengingat bahwa perbedaan adalah rahmat, bukan alasan untuk bermusuhan. Selama perbedaan tidak menyentuh

hal-hal pokok akidah, maka ia seharusnya dikelola dengan sikap saling menghargai.

Dalam masyarakat multikultural, komunikasi lintas agama juga menjadi tantangan tersendiri. Masih banyak stereotip, prasangka, dan ketidakpercayaan antaragama yang bisa memicu ketegangan. Moderasi menuntut umat Islam untuk aktif membangun dialog lintas iman, bukan hanya dalam forum formal, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Semangat *tasamuh* (toleransi) menjadi bekal penting untuk menjembatani jurang perbedaan tersebut.

Dengan segala tantangan tersebut, jelas bahwa moderasi beragama bukanlah sesuatu yang otomatis hadir dalam masyarakat multikultural. Ia harus terus diperjuangkan melalui pendidikan, dakwah, kebijakan publik, dan keteladanan elit agama. Moderasi bukan sekadar konsep, tetapi praktik yang nyata dalam relasi sosial. Hanya dengan demikian, masyarakat multikultural dapat hidup harmonis tanpa mengorbankan identitas keagamaan masing-masing.

Dengan demikian, moderasi beragama adalah jawaban strategis atas tantangan masyarakat multikultural Indonesia. Ia hadir untuk meredam radikalisme, melawan politik identitas, memperjuangkan keadilan sosial, serta memperkuat toleransi lintas agama. Tantangan-tantangan tersebut memang besar, tetapi sekaligus menjadi peluang untuk meneguhkan Islam sebagai agama yang membawa kedamaian dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

Bab 4

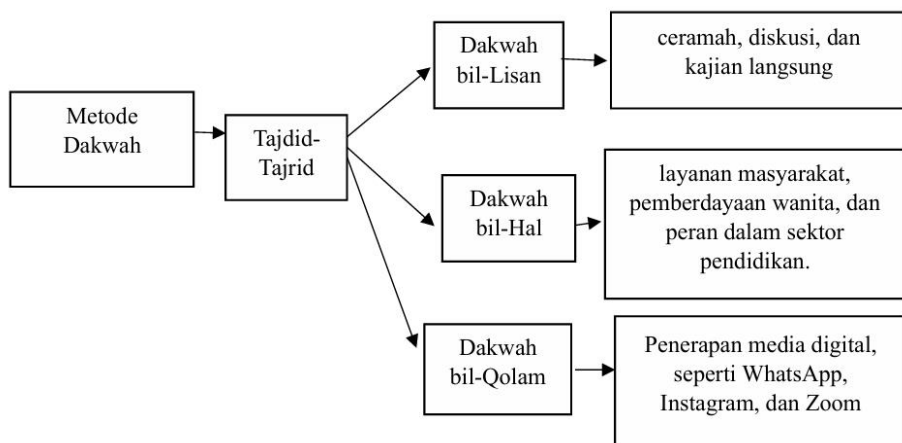
Strategi Dakwah Moderat Muhammadiyah Surabaya

Dakwah yang dijalankan oleh para elit Muhammadiyah di Surabaya merepresentasikan integrasi komprehensif dari tiga model dakwah yang diklasifikasikan oleh Amin (2009), yakni dakwah bil-lisan (melalui ucapan dan ceramah), dakwah bil-hal (melalui tindakan nyata), dan dakwah bil-qolam (melalui tulisan dan gagasan). Integrasi ini tidak hanya sekadar relevan dalam kerangka teoretis, tetapi juga menunjukkan implementasi nyata yang kontekstual di tengah dinamika masyarakat perkotaan yang kompleks seperti Surabaya.

Kekuatan dari pendekatan ini terletak pada kemampuannya merespons kebutuhan zaman dengan fleksibilitas tinggi. Para pemimpin Muhammadiyah mampu mengkombinasikan dimensi verbal, praktis, dan literer dakwah secara harmonis, sehingga pesan Islam tidak berhenti pada ranah wacana, tetapi menjelma menjadi praktik sosial sekaligus pemikiran strategis yang membumi. Hal ini menjadi penting, mengingat audiens perkotaan memiliki latar belakang yang semakin beragam, dengan kebutuhan spiritual dan sosial yang terus berkembang.

Dengan demikian, integrasi tiga bentuk dakwah tersebut bukan hanya mencerminkan konsistensi terhadap ajaran Islam, melainkan juga memperlihatkan kecanggihan adaptasi Muhammadiyah terhadap realitas sosial kontemporer. Strategi ini menegaskan bahwa dakwah di kota besar tidak bisa bersifat tunggal, melainkan harus bersinergi dengan dinamika budaya, teknologi, dan psikologi masyarakat modern.

Kerangka integrasi ini dapat dipetakan lebih sistematis sebagaimana tergambar pada bagan berikut, yang memperlihatkan hubungan fungsional antara bil-lisan, bil-hal, dan bil-qolam dalam menopang efektivitas dakwah di Surabaya.



Tajdid dan Tajrid merupakan inti dari metode dakwah Muhammadiyah. Sebagai salah satu pelopor gerakan pembaruan Islam di Indonesia, Muhammadiyah memiliki pengaruh besar dalam bidang pendidikan, sosial, dan dakwah. Prinsip tajdid yang dipegang teguh mencakup dua hal penting: pemurnian ajaran Islam dari unsur-unsur luar yang dianggap menyimpang, serta pengembangan ajaran Islam agar tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman modern.

Dakwah Bil-Lisan: Ceramah, Diskusi, Kajian

Dalam tradisi dakwah Islam, metode yang paling umum dikenal adalah dakwah bil-lisan, yakni menyampaikan ajaran Islam melalui ucapan. Bagi Muhammadiyah di Surabaya, dakwah bil-lisan tetap menjadi sarana penting untuk menanamkan nilai moderasi beragama. Ceramah, diskusi, dan kajian rutin menjadi wahana utama para muballigh dalam menyebarkan pemahaman Islam yang ramah, inklusif, dan sesuai dengan konteks masyarakat kota besar yang multikultural.

Ceramah keagamaan yang diselenggarakan Muhammadiyah, baik di masjid, sekolah, maupun ruang publik lain, selalu menekankan nilai-nilai *tawassuth* (jalan tengah),

i'tidal (keadilan), *tasamuh* (toleransi), dan *ishlah* (perbaikan). Para penceramah Muhammadiyah berusaha menjauhkan diri dari retorika yang memecah belah atau menghakimi, dan lebih memilih pendekatan edukatif. Dengan gaya ini, dakwah bil-lisan bukan hanya menyampaikan dogma, melainkan mengajak jamaah untuk berpikir kritis, reflektif, dan kontekstual terhadap ajaran Islam (Nashir, 2010).

Selain ceramah, forum diskusi menjadi salah satu inovasi dakwah Muhammadiyah di Surabaya. Diskusi menghadirkan ruang partisipasi yang lebih interaktif, di mana jamaah tidak sekadar mendengar, tetapi juga bertanya, mengkritisi, dan berbagi pandangan. Model dakwah seperti ini sangat relevan dengan karakter masyarakat perkotaan yang cenderung rasional dan terbiasa dengan dinamika intelektual. Dengan diskusi, nilai moderasi dapat lebih mudah ditanamkan karena terjadi proses dialog dua arah.

Kajian rutin, baik mingguan maupun bulanan, juga menjadi medium penting. Muhammadiyah Surabaya mengembangkan kajian tematik yang tidak hanya membahas persoalan ibadah, tetapi juga masalah sosial seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga relasi antaragama. Dengan memperluas tema dakwah, Muhammadiyah menunjukkan bahwa Islam relevan dengan seluruh aspek kehidupan. Inilah wujud nyata moderasi: Islam tidak hanya berfokus pada ritual, tetapi juga hadir sebagai solusi atas problem masyarakat.

Dakwah bil-lisan yang moderat juga ditopang oleh gaya bahasa yang digunakan para muballigh. Bahasa yang santun, argumentatif, dan mengedepankan hikmah menjadi ciri khas. Mereka menghindari penggunaan istilah yang merendahkan kelompok lain, baik sesama Muslim maupun non-Muslim. Hal ini sejalan dengan perintah Al-Qur'an dalam QS. An-Nahl: 125 untuk menyeru manusia dengan hikmah dan nasihat yang baik. Dengan cara ini, dakwah Muhammadiyah dapat diterima oleh masyarakat yang beragam tanpa menimbulkan resistensi.

Dalam konteks Surabaya, dakwah bil-lisan juga diarahkan untuk merespons isu-isu lokal. Misalnya, pasca tragedi bom gereja 2018, ceramah dan kajian Muhammadiyah banyak menekankan pentingnya persaudaraan lintas agama serta menolak radikalisme. Respons cepat ini menunjukkan bagaimana dakwah bil-lisan tidak sekadar mengulang materi klasik, tetapi menyesuaikan dengan kebutuhan sosial yang mendesak. Hal ini membuat dakwah Muhammadiyah relevan dan mampu menjawab keresahan masyarakat.

Para elit Muhammadiyah di Surabaya pun memainkan peran penting dalam mengawal dakwah bil-lisan agar tidak keluar dari koridor moderasi. Melalui Lembaga Dakwah, Majelis Tabligh, dan jaringan amal usaha, Muhammadiyah membekali para muballigh dengan materi, metode, dan narasi yang sesuai dengan visi moderasi beragama. Dengan demikian, dakwah bil-lisan tidak berjalan sporadis, tetapi memiliki arah yang jelas: mencerdaskan, mencerahkan, dan mempersatukan umat.

Dengan berbagai upaya ini, dakwah bil-lisan Muhammadiyah di Surabaya terbukti menjadi sarana strategis dalam menanamkan nilai moderasi beragama. Ceramah, diskusi, dan kajian tidak hanya menguatkan keimanan umat, tetapi juga memperkokoh kerukunan sosial di tengah keberagaman kota metropolitan. Dakwah bil-lisan menjadi bukti bahwa kata-kata, jika disampaikan dengan hikmah dan moderasi, mampu membangun jembatan antara iman dan kemanusiaan.

Dakwah Bil-Hal: Pendidikan dan Pelayanan Sosial

Jika dakwah bil-lisan menekankan pada penyampaian pesan melalui ucapan, maka dakwah bil-hal lebih menekankan pada keteladanan nyata melalui perbuatan. Muhammadiyah sejak awal berdirinya dikenal sebagai gerakan dakwah bil-hal, yaitu

dakwah yang diwujudkan dalam aksi sosial, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Di Surabaya, strategi ini menjadi salah satu kekuatan utama dalam menanamkan nilai moderasi beragama.

Salah satu wujud dakwah bil-hal yang paling menonjol adalah pendidikan. Muhammadiyah Surabaya mengelola berbagai sekolah, perguruan tinggi, hingga pesantren modern yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum. Di ruang-ruang pendidikan ini, moderasi beragama ditanamkan melalui kurikulum, metode pembelajaran, dan interaksi sosial antarwarga sekolah. Dengan menekankan nilai keterbukaan dan keilmuan, sekolah Muhammadiyah mencetak generasi muda yang religius sekaligus kosmopolit, siap hidup di masyarakat multikultural (Nashir, 2010).

Selain pendidikan, pelayanan kesehatan juga menjadi media dakwah bil-hal. Rumah sakit dan klinik Muhammadiyah di Surabaya terbuka bagi semua lapisan masyarakat tanpa membedakan agama, suku, atau status sosial. Praktik ini menegaskan bahwa Islam adalah agama yang peduli pada kemanusiaan universal. Pasien non-Muslim yang merasakan pelayanan rumah sakit Muhammadiyah sering kali melihat langsung wajah Islam yang ramah dan inklusif. Inilah dakwah tanpa kata-kata, yang justru lebih kuat dampaknya dalam membangun citra Islam moderat.

Dakwah bil-hal juga diwujudkan dalam bentuk pelayanan sosial. Muhammadiyah melalui Lazismu (Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah) aktif menyalurkan bantuan bagi kaum dhuafa, korban bencana, dan masyarakat marjinal di Surabaya. Aktivitas sosial ini tidak memandang latar belakang agama penerima bantuan. Dengan cara ini, Muhammadiyah menunjukkan bahwa kepedulian adalah bagian integral dari dakwah Islam. Moderasi hadir bukan hanya dalam retorika, tetapi dalam aksi solidaritas nyata.

Di bidang pemberdayaan masyarakat, Muhammadiyah mengembangkan berbagai program ekonomi, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha kecil. Program-program ini tidak hanya meningkatkan taraf hidup masyarakat, tetapi juga mencegah munculnya radikalisme yang sering tumbuh subur di tengah kemiskinan dan keterpinggiran sosial. Dengan memberdayakan masyarakat, Muhammadiyah menguatkan basis sosial moderasi beragama yang kokoh.

Kekuatan dakwah bil-hal terletak pada sifatnya yang inklusif. Pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial Muhammadiyah di Surabaya dapat diakses semua orang, sehingga menjadi ruang perjumpaan antaragama yang damai. Hal ini memperkuat kohesi sosial dan mengikis prasangka. Banyak penelitian menunjukkan bahwa perjumpaan positif lintas agama dalam ruang-ruang pelayanan sosial dapat meningkatkan toleransi dan saling pengertian (Azra, 2002).

Selain itu, dakwah bil-hal juga memperlihatkan relevansi ajaran Islam dalam menjawab tantangan zaman. Di era modern, masyarakat cenderung menilai agama bukan hanya dari ajaran normatif, tetapi juga dari kontribusinya pada kehidupan publik. Muhammadiyah dengan dakwah bil-hal membuktikan bahwa Islam mampu memberi solusi nyata, mulai dari pendidikan berkualitas, layanan kesehatan terjangkau, hingga program sosial yang memberdayakan.

Dengan demikian, dakwah bil-hal Muhammadiyah di Surabaya menjadi bukti nyata bahwa moderasi beragama tidak berhenti pada retorika, melainkan diwujudkan dalam kerja nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Pendidikan dan pelayanan sosial bukan hanya sarana dakwah, tetapi juga instrumen membangun peradaban. Melalui dakwah bil-hal, Muhammadiyah memperlihatkan Islam sebagai agama amal, yang hadir untuk mencerdaskan, menyehatkan, dan menyejahterakan umat manusia.

Dakwah Bil-Qalam: Media Tulis dan Digital

Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan yang memberi perhatian besar pada dunia literasi. KH. Ahmad Dahlan dan para penerusnya memahami bahwa pena, tulisan, dan media cetak adalah sarana efektif untuk menyebarkan gagasan Islam yang mencerahkan. Inilah yang dikenal dengan dakwah bil-qalam, yakni menyampaikan ajaran Islam melalui tulisan, baik dalam bentuk buku, majalah, maupun media digital di era modern. Di Surabaya, strategi dakwah ini terus berkembang seiring perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Pada masa awal, Muhammadiyah menggunakan media cetak seperti majalah *Suara Muhammadiyah* sebagai sarana menyebarkan ide-ide pembaruan. Di Surabaya, tradisi ini dilanjutkan dengan penerbitan buletin, jurnal, hingga buku-buku yang ditulis para kader dan akademisi Muhammadiyah. Media tulis tersebut berfungsi bukan hanya sebagai sarana dakwah normatif, tetapi juga sebagai ruang dialog intelektual yang memperkuat citra Muhammadiyah sebagai gerakan berkemajuan (Alwi Shihab, 1998).

Di era digital, dakwah bil-qalam mengalami transformasi signifikan. Para kader Muhammadiyah Surabaya kini memanfaatkan website, blog, dan platform media sosial untuk menyebarkan gagasan moderasi beragama. Artikel pendek, opini, dan refleksi keagamaan dibagikan melalui platform digital, menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi muda. Dengan demikian, dakwah bil-qalam tidak lagi terbatas pada ruang akademik, tetapi hadir di tengah masyarakat secara real time.

Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube menjadi ladang dakwah baru. Aktivis Muhammadiyah di Surabaya mengemas dakwah dalam bentuk konten kreatif: infografis, video pendek, hingga podcast. Konten ini biasanya menekankan nilai-nilai Islam yang ramah, toleran, dan solutif

terhadap persoalan masyarakat modern. Dengan cara ini, dakwah bil-qalam menyesuaikan diri dengan karakter generasi digital yang lebih visual dan interaktif (Syafuruddin, 2020).

Keunggulan dakwah bil-qalam adalah sifatnya yang tahan lama dan dapat diakses lintas ruang dan waktu. Sebuah artikel atau buku yang ditulis dengan baik bisa dibaca ulang, dijadikan rujukan, bahkan diwariskan lintas generasi. Hal ini berbeda dengan dakwah lisan yang sifatnya sesaat. Karena itu, Muhammadiyah Surabaya terus mendorong kader-kadernya untuk menulis, mendokumentasikan gagasan, dan menyebarkannya melalui media yang relevan.

Namun, dakwah bil-qalam juga menghadapi tantangan besar di era digital. Informasi palsu (hoaks), ujaran kebencian, dan propaganda intoleran tersebar luas melalui media daring. Untuk melawan arus negatif ini, para intelektual Muhammadiyah dituntut lebih aktif memproduksi konten dakwah yang berkualitas, faktual, dan menyejukkan. Dengan demikian, dakwah bil-qalam tidak hanya menyampaikan pesan agama, tetapi juga berfungsi sebagai literasi digital yang membentengi masyarakat dari pengaruh ideologi radikal.

Dalam praktiknya di Surabaya, dakwah bil-qalam juga diarahkan untuk menjawab isu-isu lokal. Misalnya, tulisan tentang toleransi lintas agama, kerukunan warga pasca tragedi bom, hingga refleksi keislaman dalam menghadapi modernitas kota besar. Tulisan-tulisan ini tidak hanya beredar di kalangan internal Muhammadiyah, tetapi juga dipublikasikan di media umum, sehingga membentuk citra positif Islam moderat di ruang publik.

Dengan demikian, dakwah bil-qalam menjadi bagian penting dari strategi Muhammadiyah Surabaya dalam membangun moderasi beragama. Melalui tulisan cetak maupun digital, pesan Islam yang mencerahkan dapat menjangkau masyarakat lebih luas dan bertahan lebih lama. Dakwah bil-qalam membuktikan bahwa pena, meski tanpa suara, mampu

berbicara lebih keras daripada kata-kata, menjadi senjata damai dalam merawat keberagaman dan membangun peradaban.

Dakwah Dialogis di Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Di tengah masyarakat yang plural seperti Surabaya, ruang dialog antaragama menjadi kebutuhan yang mendesak. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) hadir sebagai wadah resmi yang mempertemukan tokoh-tokoh lintas agama untuk membangun komunikasi, menyelesaikan persoalan, dan merawat kerukunan. Muhammadiyah Surabaya, melalui para elit dan kadernya, aktif mengambil peran dalam forum ini dengan mengusung model dakwah dialogis, yakni dakwah yang menekankan keterbukaan, komunikasi dua arah, dan penghargaan terhadap perbedaan.

Dakwah dialogis berarti menjadikan dakwah bukan sekadar aktivitas menyampaikan pesan, melainkan juga mendengarkan, memahami, dan bekerja sama. Muhammadiyah Surabaya memandang bahwa kerukunan antarumat beragama tidak mungkin dibangun dengan ceramah satu arah yang cenderung normatif, melainkan harus melalui interaksi dialogis. Dengan duduk bersama di FKUB, para tokoh Muhammadiyah dapat menjelaskan pandangan Islam tentang toleransi, sekaligus mendengar pengalaman dan pandangan dari agama lain.

Keterlibatan Muhammadiyah di FKUB Surabaya sangat strategis. Kota ini pernah mengalami luka sosial akibat tragedi bom gereja tahun 2018, yang mengguncang rasa aman dan kepercayaan antaragama. Dalam situasi itu, Muhammadiyah bersama tokoh agama lain berinisiatif menguatkan kembali jalinan persaudaraan melalui dialog lintas iman. Kehadiran Muhammadiyah di FKUB membantu menegaskan bahwa Islam,

khususnya Islam ala Muhammadiyah, adalah agama yang menolak kekerasan dan menjunjung tinggi perdamaian.

Dakwah dialogis juga berfungsi mencegah lahirnya prasangka dan stereotip negatif antaragama. Ketika umat beragama jarang berinteraksi, prasangka mudah tumbuh. Dengan dialog rutin, FKUB menjadi ruang untuk saling klarifikasi, menjernihkan kesalahpahaman, dan membangun trust. Muhammadiyah dalam forum ini tidak hanya membawa agenda internal Islam, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai universal: keadilan, kemanusiaan, dan solidaritas.

Lebih dari itu, dakwah dialogis di FKUB juga berdimensi praktis. Forum ini sering menjadi mediator dalam penyelesaian konflik sosial-keagamaan, misalnya perdebatan tentang pendirian rumah ibadah, kegiatan keagamaan di ruang publik, atau isu sensitif lain. Kehadiran Muhammadiyah dengan pendekatan moderat membuat proses mediasi lebih kondusif. Para elit Muhammadiyah biasanya menekankan pentingnya mencari titik temu (*kalimatun sawa'*) daripada mempertajam perbedaan.

Partisipasi Muhammadiyah dalam FKUB juga memperlihatkan bahwa dakwah tidak selalu berarti mengajak orang masuk Islam. Dalam kerangka moderasi, dakwah dipahami sebagai upaya memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan universal yang sejalan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, keikutsertaan Muhammadiyah dalam dialog lintas agama justru memperluas makna dakwah, menjadikannya instrumen membangun perdamaian dan kohesi sosial.

Di era globalisasi, peran FKUB semakin penting. Arus informasi yang cepat sering memicu konflik berbasis agama, baik yang bersumber dari lokal maupun global. Dalam situasi ini, Muhammadiyah di Surabaya berperan sebagai “juru damai” yang menekankan perlunya literasi keagamaan yang sehat, penghargaan terhadap konstitusi, dan penguatan nilai kebangsaan. Dakwah dialogis dalam FKUB dengan demikian

sekaligus menjadi benteng terhadap radikalisme yang mencoba mengganggu kerukunan.

Dengan demikian, dakwah dialogis Muhammadiyah di FKUB Surabaya adalah bagian integral dari strategi dakwah moderat. Melalui forum ini, Muhammadiyah tidak hanya menyampaikan pesan Islam yang ramah, tetapi juga membuktikan komitmennya terhadap kerukunan nasional. Dakwah model ini menunjukkan bahwa berbicara dan mendengar dengan hati terbuka adalah salah satu jalan terbaik untuk menghadirkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Menjangkau Generasi Muda

Generasi muda adalah aset sekaligus tantangan bagi dakwah Islam. Mereka adalah pemilik masa depan bangsa, namun juga kelompok yang paling rentan terhadap pengaruh ideologi transnasional, arus globalisasi, serta derasannya informasi digital. Muhammadiyah di Surabaya menyadari hal ini, sehingga strategi dakwah moderatnya diarahkan secara khusus untuk menjangkau generasi muda. Dakwah kepada pemuda tidak bisa menggunakan cara lama yang kaku dan monologis, melainkan harus adaptif, dialogis, serta sesuai dengan bahasa dan kultur mereka.

Salah satu pendekatan utama Muhammadiyah adalah melalui pendidikan kader. Organisasi otonom seperti Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Pemuda Muhammadiyah menjadi wadah pembinaan intensif bagi generasi muda. Melalui pelatihan kepemimpinan, kajian ideologis, hingga aktivitas sosial, para pemuda dibekali dengan pemahaman Islam yang moderat sekaligus wawasan kebangsaan yang kokoh. Dengan cara ini, Muhammadiyah tidak hanya membina secara spiritual, tetapi juga membentuk karakter pemimpin masa depan (Nashir, 2010).

Selain pendidikan kader, Muhammadiyah juga aktif dalam dunia kampus. Universitas Muhammadiyah Surabaya, misalnya, menjadi pusat dakwah yang sangat strategis. Melalui kurikulum, kegiatan kemahasiswaan, dan organisasi intra maupun ekstra kampus, Muhammadiyah menanamkan nilai moderasi kepada mahasiswa. Kampus Muhammadiyah bukan hanya tempat belajar ilmu, tetapi juga ruang untuk melatih kepemimpinan, toleransi, dan kepedulian sosial.

Muhammadiyah Surabaya juga memahami bahwa generasi muda adalah generasi digital. Karena itu, dakwah diarahkan ke media sosial, YouTube, podcast, dan platform digital lain yang digemari anak muda. Konten dakwah dikemas lebih kreatif, singkat, visual, dan interaktif. Misalnya, pesan moderasi beragama disampaikan melalui video inspiratif, infografis, atau diskusi daring. Dengan menyesuaikan diri dengan kultur digital, dakwah Muhammadiyah mampu menjangkau anak muda tanpa terkesan menggurui (Syafuruddin, 2020).

Selain itu, Muhammadiyah juga mengembangkan program kewirausahaan dan pemberdayaan ekonomi bagi generasi muda. Pemuda diajak untuk mandiri, kreatif, dan produktif, sehingga mereka tidak mudah terjerumus pada ideologi radikal yang sering mengeksploitasi kemiskinan dan pengangguran. Program kewirausahaan berbasis komunitas ini juga menumbuhkan solidaritas sosial di kalangan anak muda. Dengan demikian, dakwah Muhammadiyah kepada pemuda tidak hanya menyentuh aspek spiritual, tetapi juga aspek ekonomi dan sosial.

Upaya menjangkau generasi muda juga diwujudkan dalam dialog lintas iman. Muhammadiyah Surabaya sering melibatkan pemuda dalam kegiatan bersama dengan komunitas lintas agama, seperti bakti sosial, kerja lingkungan, atau diskusi kebangsaan. Melalui pertemuan positif ini, generasi muda belajar langsung bagaimana membangun toleransi dan solidaritas. Pengalaman seperti ini jauh lebih efektif daripada

sekadar teori, karena mereka merasakannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Tentu saja, menjangkau generasi muda bukan tanpa tantangan. Anak muda cenderung kritis, cepat bosan, dan lebih menghargai otentisitas ketimbang formalitas. Karena itu, Muhammadiyah berupaya menghadirkan figur-figur muda sebagai role model dakwah. Dengan menampilkan dai muda yang dekat dengan kultur generasi mereka, pesan moderasi beragama lebih mudah diterima.

Dengan strategi-strategi tersebut, Muhammadiyah Surabaya berhasil membangun basis dakwah moderat di kalangan generasi muda. Mereka tidak hanya menjadi penerima dakwah, tetapi juga pelaku dakwah yang membawa nilai moderasi ke lingkungannya masing-masing. Inilah cara Muhammadiyah memastikan bahwa moderasi beragama tidak berhenti di satu generasi, tetapi terus berlanjut dan relevan di masa depan.

Bab 5

Model Internalisasi Moderasi Beragama

Landasan Pemikiran dan Teologi

Setiap gerakan moderasi beragama membutuhkan pijakan konseptual dan teologis yang kuat. Tanpa landasan ini, moderasi mudah dipahami sekadar strategi pragmatis atau kompromi politik, padahal hakikatnya ia berakar dari ajaran Islam itu sendiri. Muhammadiyah di Surabaya membangun internalisasi moderasi beragama dengan bertumpu pada dua fondasi utama: pemikiran keagamaan yang rasional-progresif dan teologi Islam yang berorientasi pada kemanusiaan universal.

Secara pemikiran, Muhammadiyah mewarisi tradisi *tajdid* (pembaruan) yang digagas KH. Ahmad Dahlan sejak awal abad ke-20. *Tajdid* berarti menghidupkan kembali ajaran Islam sesuai Al-Qur'an dan Sunnah, sembari menyesuaikannya dengan tuntutan zaman. Dalam kerangka ini, moderasi bukanlah konsep asing, melainkan konsekuensi logis dari sikap *tajdid*. Umat diajak kembali kepada sumber pokok Islam dengan cara yang rasional, sehingga dapat menghindari ekstremisme di satu sisi maupun sikap jumud di sisi lain (Nashir, 2010).

Dari sisi teologi, Muhammadiyah berpijak pada konsep *tauhid* yang murni. Keyakinan pada keesaan Allah menegaskan bahwa seluruh manusia adalah makhluk yang setara di hadapan-Nya. Dari sinilah lahir orientasi kemanusiaan dalam dakwah. Moderasi beragama tidak dipahami semata sebagai strategi sosial, melainkan sebagai implikasi dari tauhid: menjaga martabat manusia, menolak penindasan, serta mengupayakan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) (Shihab, 1999).

Selain tauhid, landasan teologis penting lainnya adalah konsep *rahmatan lil-'alamin*. Islam dipahami bukan hanya sebagai agama untuk umat Muslim, melainkan rahmat bagi seluruh alam. Nilai ini mendorong Muhammadiyah untuk menjadikan moderasi beragama sebagai cara menghadirkan Islam yang ramah, toleran, dan berorientasi pada kesejahteraan

bersama. Dengan demikian, sikap moderat bukanlah pilihan opsional, melainkan mandat langsung dari teks suci.

Landasan pemikiran moderasi Muhammadiyah juga berakar dari tradisi ijtihad. Dalam menghadapi persoalan kontemporer, Muhammadiyah selalu membuka ruang ijtihad kolektif melalui Majelis Tarjih dan Tajdid. Forum ini menjadi wadah mengkaji ulang persoalan hukum dan sosial dengan pendekatan maqashid al-syariah, yakni tujuan syariah yang berorientasi pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan kerangka maqashid, moderasi beragama mendapat dasar normatif yang kokoh sekaligus fleksibel dalam implementasi.

Selain itu, pemikiran moderasi juga ditopang oleh nilai kebangsaan. Muhammadiyah menerima Pancasila sebagai konsensus final bangsa Indonesia. Pancasila tidak dilihat sebagai pesaing agama, melainkan sebagai wadah bersama untuk menjaga keberagaman. Dari perspektif teologis, penerimaan Pancasila adalah bentuk implementasi prinsip *mitsaqan ghalizha* (perjanjian kokoh) dalam kehidupan berbangsa. Dengan cara ini, moderasi Muhammadiyah tidak hanya religius, tetapi juga nasionalis.

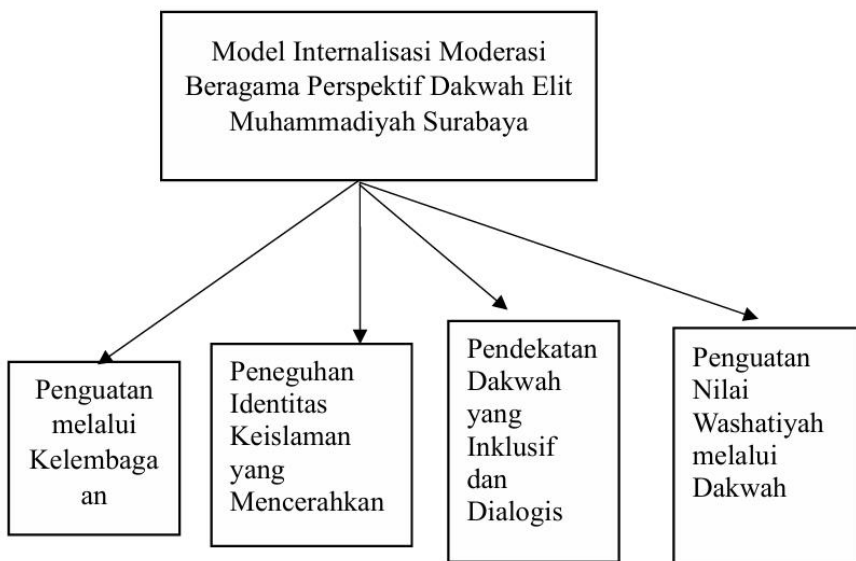
Landasan pemikiran dan teologi ini kemudian diinternalisasikan melalui pendidikan kader, khutbah, kajian, dan dokumen resmi organisasi. Dengan fondasi tersebut, para elit Muhammadiyah di Surabaya memiliki rujukan ideologis yang jelas dalam setiap praktik dakwahnya. Mereka tidak sekadar mengajarkan toleransi secara pragmatis, tetapi meneguhkannya sebagai bagian dari iman dan ibadah.

Dengan demikian, landasan pemikiran dan teologi menjadi pondasi yang membedakan moderasi Muhammadiyah dari sekadar jargon sosial. Moderasi beragama dalam Muhammadiyah berakar pada tauhid, berorientasi pada rahmat, digerakkan oleh ijtihad, dan diperkaya oleh nilai kebangsaan. Dari dasar inilah, model internalisasi moderasi dapat dibangun

secara kokoh dan berkelanjutan, tidak mudah digoyahkan oleh arus radikalisme maupun intoleransi.

Dalam konteks ini, model internalisasi moderasi keagamaan mengacu pada pendekatan sistematis dan kontekstual yang diterapkan oleh para pemimpin dakwah Muhammadiyah dalam membangun nilai wasathiyah, dengan tujuan menciptakan masyarakat beragama yang inklusif, toleran, dan mendukung perdamaian sosial. Proses ini sesuai dengan pengertian internalisasi menurut Subakti, yang menggambarkan sebuah proses yang mendalam dalam menyelaraskan nilai-nilai dalam diri agar menjadi sumber inspirasi dalam tindakan sosial dan keagamaan (S. Amin, 2023).

Adapun empat elemen utama dari model ini dapat dilihat pada bagan berikut:



Penguatan Moderasi Melalui Kelembagaan

Moderasi beragama tidak mungkin bertahan hanya melalui wacana individual; ia membutuhkan sistem yang kokoh untuk menopangnya. Muhammadiyah di Surabaya memahami hal ini dengan membangun kelembagaan yang berfungsi sebagai motor penguatan moderasi. Kelembagaan bukan sekadar struktur organisasi, tetapi juga instrumen sosial yang menjamin nilai moderasi dapat diwariskan lintas generasi dan dipraktikkan dalam berbagai lini kehidupan.

Di tubuh Muhammadiyah, peran Majelis Tabligh, Majelis Tarjih dan Tajdid, serta Lembaga Dakwah menjadi sentral. Majelis Tabligh, misalnya, mengatur kurikulum dakwah agar pesan yang disampaikan para muballigh tetap sejalan dengan visi moderasi. Dengan cara ini, dakwah Muhammadiyah tidak berjalan liar atau reaktif, tetapi memiliki arah yang konsisten: mencerdaskan, mencerahkan, dan mempersatukan umat (Nashir, 2010).

Majelis Tarjih dan Tajdid memiliki peran strategis dalam menjaga dasar normatif dakwah moderat. Melalui keputusan tarjih, Muhammadiyah menetapkan sikap keagamaan yang menghindari ekstremisme dan mengedepankan kemaslahatan. Keputusan-keputusan ini tidak hanya berlaku secara internal, tetapi juga menjadi rujukan umat Islam yang lebih luas. Dengan landasan tarjih, moderasi Muhammadiyah memiliki pijakan teologis yang kokoh sekaligus relevan dengan realitas sosial.

Selain lembaga keagamaan, amal usaha Muhammadiyah (AUM) seperti sekolah, universitas, rumah sakit, dan panti asuhan juga menjadi sarana penting internalisasi moderasi. Di sekolah Muhammadiyah, nilai-nilai toleransi ditanamkan melalui kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler. Di rumah sakit Muhammadiyah, pelayanan tanpa diskriminasi agama menjadi praktik dakwah moderat yang nyata. Amal usaha ini memperlihatkan bahwa moderasi bukan hanya ide, tetapi juga sistem pelayanan publik yang berkeadilan.

Kelembagaan Muhammadiyah juga berfungsi sebagai penguat jejaring sosial. Di Surabaya, Muhammadiyah aktif bekerja sama dengan pemerintah kota, FKUB, ormas Islam lain, dan komunitas lintas agama. Kolaborasi ini memperluas ruang dakwah moderat sekaligus membangun kepercayaan antaraktor sosial. Dengan basis kelembagaan, kerja sama ini tidak bersifat personal atau temporer, melainkan berkelanjutan dan terstruktur.

Dalam konteks kaderisasi, lembaga otonom Muhammadiyah seperti IPM, IMM, Nasyiatul Aisyiyah, dan Pemuda Muhammadiyah menjadi wahana penguatan moderasi di kalangan generasi muda. Kelembagaan ini membentuk sistem kaderisasi yang berkesinambungan, sehingga nilai moderasi tidak berhenti pada elit, tetapi turun ke akar rumput. Di sinilah letak keunggulan Muhammadiyah: ia memiliki struktur yang memungkinkan internalisasi nilai secara sistematis.

Kelembagaan juga berfungsi sebagai benteng dari infiltrasi ideologi radikal. Dengan adanya sistem kontrol, Muhammadiyah mampu mengidentifikasi dan menyeleksi wacana atau praktik dakwah yang berpotensi intoleran. Misalnya, ceramah-ceramah yang cenderung provokatif dapat diarahkan ulang melalui regulasi organisasi. Dengan demikian, kelembagaan Muhammadiyah berperan sebagai filter yang menjaga konsistensi dakwah moderat.

Dengan semua mekanisme ini, jelas bahwa kelembagaan adalah pilar penting dalam penguatan moderasi beragama. Melalui majelis, amal usaha, organisasi otonom, dan jejaring sosial, Muhammadiyah Surabaya mampu menginternalisasi nilai moderasi secara lebih luas dan mendalam. Moderasi tidak hanya hidup dalam wacana, tetapi beroperasi melalui sistem yang kokoh, teruji, dan berkesinambungan.

Peneguhan Identitas Keislaman yang Mencerahkan

Moderasi beragama bukan berarti melemahkan identitas keislaman, melainkan justru meneguhkannya dalam bentuk yang mencerahkan. Muhammadiyah di Surabaya memandang bahwa seorang Muslim yang moderat tetap memiliki identitas keislaman yang kuat, tetapi identitas tersebut diwujudkan dengan cara yang ramah, inklusif, dan berorientasi pada perbaikan sosial. Identitas Islam yang mencerahkan inilah yang menjadi ciri khas dakwah Muhammadiyah sejak awal berdirinya.

Dalam doktrin Muhammadiyah, Islam dipahami sebagai agama yang menyinari kehidupan, bukan membebani. Konsep “Islam berkemajuan” menegaskan bahwa umat Islam harus hadir dengan wajah yang optimis, cerdas, dan produktif. Dengan paradigma ini, keislaman tidak diwujudkan dalam bentuk simbolisme semata, tetapi melalui kontribusi nyata bagi peradaban. Seorang Muslim yang meneguhkan identitasnya berarti ia beribadah dengan tekun, sekaligus bermanfaat bagi sesama manusia (Nashir, 2010).

Di Surabaya, peneguhan identitas keislaman dilakukan melalui ruang pendidikan, dakwah, dan pelayanan sosial. Identitas Muslim moderat tercermin pada siswa dan mahasiswa Muhammadiyah yang tidak hanya memahami Al-Qur’an dan hadis, tetapi juga mampu berdialog dengan ilmu modern dan keterbukaan global. Dengan cara ini, identitas keislaman menjadi sumber inspirasi, bukan sekadar label formal.

Identitas keislaman yang mencerahkan juga tampak dalam cara Muhammadiyah membangun relasi sosial. Seorang Muslim Muhammadiyah tidak diajarkan untuk eksklusif atau menarik diri dari masyarakat, tetapi justru terlibat aktif dalam kehidupan publik. Kehadiran mereka di forum kebangsaan, FKUB, maupun kegiatan sosial lintas iman adalah ekspresi

nyata dari identitas keislaman yang tidak terjebak dalam isolasi, melainkan terbuka bagi perjumpaan.

Hal yang menarik, Muhammadiyah menolak keras anggapan bahwa moderasi sama dengan kompromi terhadap prinsip agama. Bagi Muhammadiyah, identitas Muslim sejati tetap berakar pada tauhid, syariat, dan akhlak Islam. Hanya saja, semua itu diekspresikan dengan cara yang kontekstual dan maslahat. Misalnya, dalam berpakaian, berinteraksi sosial, atau mengelola ekonomi, umat Muhammadiyah tetap mengikuti syariat, namun dengan cara yang tidak menimbulkan permusuhan atau diskriminasi terhadap pihak lain (Shihab, 1999).

Peneguhan identitas ini juga dilakukan dengan narasi yang positif. Muhammadiyah berusaha menggeser wacana keislaman dari yang bersifat defensif-apologetik menuju proaktif dan solutif. Identitas Muslim bukan sekadar “membela Islam dari serangan luar,” tetapi juga “menunjukkan Islam sebagai solusi atas problem kemanusiaan.” Pergeseran ini sangat penting di era modern, di mana masyarakat lebih menilai agama dari kontribusinya bagi kemaslahatan bersama.

Di tingkat akar rumput, peneguhan identitas keislaman yang mencerahkan diwujudkan melalui pembiasaan nilai. Misalnya, melalui kajian rutin, khutbah Jumat, hingga kegiatan sosial di masjid-masjid Muhammadiyah. Jamaah didorong untuk menampilkan Islam dalam sikap jujur, disiplin, peduli, dan toleran. Dengan demikian, identitas keislaman tidak hanya ditunjukkan lewat simbol lahiriah, tetapi terutama melalui akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan strategi ini, Muhammadiyah di Surabaya berhasil meneguhkan identitas keislaman yang tidak eksklusif, tetapi juga tidak kehilangan prinsip. Identitas itu bersinar justru karena mampu menghadirkan Islam yang mencerahkan: Islam yang menjaga keimanan sekaligus menghormati kemanusiaan, Islam yang teguh dalam akidah namun terbuka dalam

pergaulan sosial. Inilah wajah Islam moderat yang ingin diwariskan Muhammadiyah kepada generasi mendatang.

Pendekatan Inklusif dan Dialogis

Moderasi beragama pada hakikatnya tidak bisa dilepaskan dari sikap inklusif dan dialogis. Inklusif berarti terbuka terhadap keberagaman, tidak menutup diri dari perbedaan, dan mengakui adanya kebenaran yang bisa dipelajari dari pihak lain. Dialogis berarti menjadikan komunikasi dua arah sebagai landasan dalam interaksi antarumat beragama. Muhammadiyah di Surabaya mempraktikkan kedua pendekatan ini secara konsisten, sehingga dakwahnya diterima luas di masyarakat multikultural.

Pendekatan inklusif Muhammadiyah berakar pada ajaran Islam yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal, bukan untuk saling bermusuhan (QS. Al-Hujurat [49]: 13). Ayat ini menjadi pijakan teologis bagi Muhammadiyah untuk membangun keterbukaan dalam relasi sosial. Identitas keislaman tetap dijaga, tetapi tidak dijadikan penghalang bagi kerja sama lintas iman.

Sikap inklusif ini terlihat jelas dalam berbagai amal usaha Muhammadiyah di Surabaya. Sekolah dan rumah sakit Muhammadiyah terbuka untuk semua, tanpa diskriminasi agama. Di ruang pelayanan inilah terbangun perjumpaan yang sehat antara umat Islam dengan umat lain. Perjumpaan yang inklusif ini menumbuhkan rasa saling percaya dan mengikis prasangka, sehingga moderasi beragama benar-benar hidup dalam praktik sehari-hari (Azra, 2002).

Di sisi lain, pendekatan dialogis diwujudkan melalui partisipasi aktif Muhammadiyah dalam forum lintas agama, terutama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Dalam forum ini, para elit Muhammadiyah tidak hanya menyampaikan

pandangan Islam, tetapi juga mendengarkan perspektif dari agama lain. Dialog semacam ini menciptakan ruang saling belajar, sehingga moderasi tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga pengalaman nyata dalam interaksi sosial.

Pendekatan dialogis ini juga diterapkan dalam dakwah internal. Para muballigh Muhammadiyah di Surabaya didorong untuk mengedepankan dakwah yang dialogis, bukan monologis. Jamaah diajak untuk berdiskusi, bertanya, dan berbagi pengalaman. Dengan cara ini, dakwah menjadi lebih partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Model ini sekaligus melatih umat untuk terbiasa dengan budaya dialog, sehingga lebih siap menghadapi pluralitas.

Keunggulan dari pendekatan inklusif dan dialogis adalah kemampuannya untuk mengurangi ketegangan sosial. Konflik antaragama atau antarkelompok biasanya lahir dari kecurigaan dan miskomunikasi. Dengan membangun ruang dialog yang inklusif, Muhammadiyah membantu menciptakan atmosfer sosial yang lebih damai. Hal ini sangat relevan di Surabaya, kota besar dengan keberagaman agama dan budaya yang kompleks.

Pendekatan ini juga menjadi benteng efektif terhadap radikalisme. Ideologi intoleran tumbuh subur di ruang-ruang tertutup yang menolak dialog. Dengan membuka diri pada pertemuan, Muhammadiyah membongkar eksklusivisme itu sejak awal. Generasi muda Muhammadiyah yang terbiasa berdialog dengan perbedaan akan lebih sulit terpengaruh oleh propaganda yang mengedepankan kebencian.

Dengan demikian, pendekatan inklusif dan dialogis adalah bagian penting dari model internalisasi moderasi beragama Muhammadiyah di Surabaya. Ia memastikan bahwa Islam hadir sebagai agama yang tidak hanya meneguhkan keyakinan pemeluknya, tetapi juga mampu membangun relasi sosial yang sehat. Melalui keterbukaan dan dialog, moderasi beragama tidak berhenti sebagai ide, melainkan benar-benar menjadi budaya hidup masyarakat.

Penguatan Nilai Washatīyah di Ruang Publik

Nilai washatīyah atau jalan tengah adalah inti dari moderasi beragama. Dalam tradisi Islam, washatīyah berarti bersikap seimbang: tidak ekstrem ke kanan (fundamentalisme) maupun ke kiri (liberalisme tanpa batas). Muhammadiyah di Surabaya meneguhkan nilai ini bukan hanya di ruang internal organisasi, tetapi juga di ruang publik. Tujuannya adalah menghadirkan wajah Islam yang menyejukkan, solutif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat multikultural.

Penguatan nilai washatīyah di ruang publik terlihat dalam berbagai forum kebangsaan. Para elit Muhammadiyah Surabaya aktif berbicara di seminar, diskusi, hingga forum pemerintah daerah mengenai isu-isu toleransi, radikalisme, dan kebangsaan. Kehadiran mereka menegaskan bahwa Islam moderat tidak berada di pinggiran wacana publik, melainkan turut menentukan arah kebijakan sosial dan keagamaan di kota besar seperti Surabaya (Nashir, 2010).

Selain forum formal, penguatan nilai washatīyah juga dilakukan melalui kegiatan sosial. Misalnya, kerja bakti lintas agama, bakti sosial untuk korban bencana, hingga program kesehatan masyarakat. Aktivitas ini menunjukkan bahwa nilai moderasi bukan hanya slogan, melainkan aksi nyata yang dirasakan masyarakat. Di sinilah washatīyah menjadi bahasa universal yang mampu mempersatukan warga tanpa melihat latar belakang agama.

Media digital juga menjadi arena penting penguatan nilai washatīyah. Aktivis muda Muhammadiyah Surabaya aktif membuat konten di media sosial yang menampilkan wajah Islam yang damai, optimis, dan membangun. Pesan moderasi dikemas dalam bentuk infografis, podcast, atau video singkat yang mudah diakses publik. Dengan strategi ini, nilai washatīyah dapat menjangkau audiens yang lebih luas, khususnya generasi muda yang lebih aktif di dunia maya (Syafuruddin, 2020).

Di ruang publik, Muhammadiyah juga konsisten mendorong sikap kritis namun konstruktif. Washatiyah tidak berarti netral atau pasif, tetapi aktif memperjuangkan keadilan sosial. Misalnya, Muhammadiyah terlibat dalam advokasi kebijakan publik, seperti pendidikan yang merata, pelayanan kesehatan yang adil, atau kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil. Semua ini adalah bentuk dakwah bil-hal yang sekaligus menjadi internalisasi nilai washatiyah.

Nilai washatiyah juga diperkuat melalui kebudayaan lokal. Muhammadiyah di Surabaya tidak menolak tradisi masyarakat, selama tidak bertentangan dengan syariat. Justru, tradisi lokal dijadikan sarana dakwah yang memperkuat toleransi. Misalnya, keterlibatan dalam acara kebudayaan bersama komunitas lain yang dikemas dengan nilai islami. Dengan cara ini, Islam moderat tampil membumi, bukan asing di tengah masyarakat.

Penguatan washatiyah di ruang publik juga penting dalam menghadapi narasi intoleran. Ideologi radikal sering kali menguasai ruang publik dengan retorika provokatif. Muhammadiyah melawan hal ini dengan narasi positif yang menekankan kasih sayang, kerja sama, dan kemanusiaan. Strategi ini penting untuk menjaga ruang publik agar tetap sehat dan tidak menjadi arena subur bagi ujaran kebencian.

Dengan demikian, penguatan nilai washatiyah di ruang publik menjadikan moderasi beragama Muhammadiyah lebih hidup dan relevan. Nilai ini tidak hanya ada dalam dokumen resmi organisasi, tetapi benar-benar hadir dalam kebijakan, kegiatan sosial, media digital, dan budaya sehari-hari. Washatiyah menjadi ruh Islam berkemajuan yang membimbing umat agar tetap teguh dalam iman, sekaligus terbuka dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

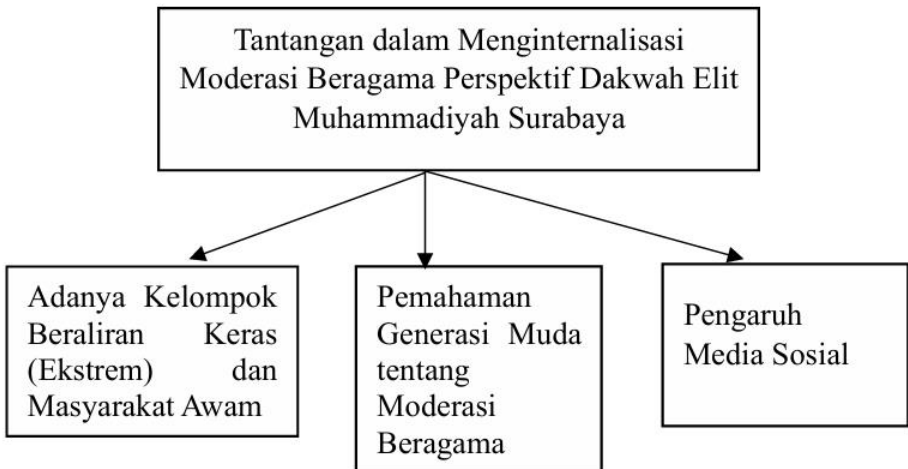
Bab 6

Tantangan di Lapangan

Tantangan dalam menginternalisasi moderasi beragama yang dihadapi para elit dakwah Muhammadiyah Surabaya menunjukkan adanya dinamika yang kompleks antara nilai-nilai ideal moderasi dengan realitas sosial sehari-hari. Sejalan dengan Yuniar (2021), internalisasi dipahami sebagai proses penanaman nilai melalui tahap kesadaran, pemahaman, penerimaan, hingga penerapan dalam kehidupan.

Namun, sebagaimana dicatat oleh Zaenuri, Marzuki, dan Jami'ah (2013), proses ini masih menghadapi sejumlah hambatan. Salah satu indikatornya adalah adanya kesenjangan antara nilai yang diajarkan dengan tingkat pemahaman atau penerimaan masyarakat, khususnya dari kelompok yang cenderung ekstrem maupun generasi muda. Tantangan lain juga muncul dalam hal pemanfaatan media digital yang belum sepenuhnya digunakan secara bijak.

Berbagai persoalan ini dapat dipetakan sebagaimana tergambar dalam bagan berikut.



Munculnya Kelompok Beraliran Keras

Salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan moderasi beragama di Surabaya adalah munculnya kelompok beraliran keras. Kelompok ini biasanya menampilkan wajah Islam yang eksklusif, menolak perbedaan, serta mengedepankan doktrin hitam-putih dalam menafsirkan ajaran agama. Mereka tidak hanya tumbuh di ruang-ruang terbatas, tetapi juga mampu memanfaatkan media digital untuk memperluas pengaruh. Akibatnya, moderasi beragama seringkali terdesak oleh narasi intoleran yang lebih provokatif.

Kelompok beraliran keras biasanya mengusung ideologi transnasional yang tidak sejalan dengan konteks keindonesiaan. Paham ini menekankan supremasi identitas keagamaan tertentu, sering kali dengan menolak Pancasila dan prinsip kebangsaan. Di kota multikultural seperti Surabaya, ideologi semacam ini berpotensi besar memecah belah masyarakat, mengingat keragaman agama dan etnis yang sudah lama hidup berdampingan (Azra, 2002).

Faktor pendorong munculnya kelompok keras cukup beragam. Pertama, adanya kekecewaan sosial-ekonomi yang dieksploitasi dengan narasi agama. Kedua, lemahnya literasi keagamaan di sebagian kalangan umat, sehingga mereka mudah menerima tafsir yang dangkal dan provokatif. Ketiga, derasnyanya arus globalisasi yang membawa isu-isu keagamaan internasional ke tingkat lokal, tanpa filter yang memadai (Roy, 2004).

Surabaya pernah mengalami dampak nyata dari kelompok radikal, terutama dalam kasus bom gereja tahun 2018. Peristiwa itu menunjukkan bahwa ideologi keras tidak berhenti pada wacana, tetapi bisa mendorong tindakan kekerasan yang nyata. Tragedi ini menjadi alarm penting bagi pemerintah dan ormas keagamaan, termasuk Muhammadiyah, untuk memperkuat moderasi beragama.

Kehadiran kelompok beraliran keras juga menghadirkan dilema di ruang publik. Di satu sisi, mereka menuntut kebebasan berpendapat, namun di sisi lain narasi yang mereka bawa justru merusak tatanan kerukunan. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius: sejauh mana kebebasan berekspresi dapat ditoleransi ketika sudah mengancam harmoni sosial? Muhammadiyah dalam hal ini berperan penting sebagai penyeimbang, dengan menghadirkan narasi alternatif yang damai dan rasional.

Muhammadiyah Surabaya merespons tantangan ini dengan memperkuat dakwah moderat yang berbasis pendidikan dan literasi keagamaan. Dengan membekali umat pemahaman Islam yang komprehensif, Muhammadiyah berusaha menutup celah yang sering dimanfaatkan kelompok radikal. Pendidikan berfungsi sebagai vaksin ideologis yang mencegah umat jatuh dalam jebakan ekstremisme.

Selain pendidikan, strategi lain adalah membangun kolaborasi lintas iman dan lintas organisasi. Kehadiran forum seperti FKUB memberi ruang untuk menunjukkan bahwa keragaman bukan ancaman, melainkan kekuatan. Ketika masyarakat melihat perjumpaan yang harmonis antaragama, narasi kelompok keras menjadi semakin tidak relevan.

Dengan demikian, munculnya kelompok beraliran keras adalah tantangan serius bagi moderasi beragama di Surabaya. Namun, tantangan ini juga menjadi peluang untuk mempertegas posisi Muhammadiyah sebagai garda terdepan Islam moderat. Dengan dakwah berbasis literasi, kolaborasi sosial, dan komitmen kebangsaan, Muhammadiyah membuktikan bahwa jalan moderat adalah pilihan terbaik untuk menjaga kerukunan dan mencegah fragmentasi sosial.

Minimnya Pemahaman Generasi Muda

Generasi muda adalah kelompok strategis dalam pembangunan bangsa, tetapi sekaligus rentan terhadap berbagai pengaruh ideologi. Minimnya pemahaman generasi muda tentang agama yang komprehensif menjadi salah satu tantangan utama dalam mewujudkan moderasi beragama di Surabaya. Banyak anak muda yang tumbuh di tengah arus informasi digital tanpa memiliki bekal literasi agama yang memadai, sehingga mudah terombang-ambing oleh wacana keagamaan yang dangkal atau bahkan menyesatkan.

Fenomena ini diperparah dengan menurunnya minat membaca teks-teks klasik atau mengikuti pengajian yang mendalam. Generasi muda cenderung lebih menyukai konten singkat di media sosial, yang sering kali berisi potongan ayat atau hadis tanpa konteks. Akibatnya, pemahaman mereka tentang Islam menjadi parsial, kaku, dan mudah ditarik ke arah ekstrem (Hefner, 2019). Dalam situasi ini, moderasi beragama sulit berakar karena tidak ada fondasi keilmuan yang kuat.

Di Surabaya, tantangan ini terlihat dalam kehidupan kampus maupun sekolah. Tidak sedikit mahasiswa atau pelajar yang terpapar propaganda intoleran melalui organisasi kemahasiswaan atau komunitas online. Minimnya literasi kritis membuat mereka sulit membedakan mana ajaran Islam yang otentik dan mana yang merupakan distorsi ideologis. Di sinilah peran lembaga pendidikan Muhammadiyah menjadi sangat penting untuk memberikan alternatif pemahaman yang rasional dan moderat.

Minimnya pemahaman generasi muda juga terkait dengan krisis identitas. Banyak anak muda yang mencari jati diri di tengah perubahan sosial yang cepat. Dalam proses pencarian ini, sebagian menemukan “kepastian” pada ajaran-ajaran yang rigid dan eksklusif. Kelompok radikal sering memanfaatkan keraguan ini dengan menawarkan jawaban sederhana atas persoalan kompleks. Padahal, jawaban tersebut

justru menjerumuskan mereka ke dalam sikap intoleran (Azra, 2002).

Muhammadiyah di Surabaya merespons persoalan ini dengan mengembangkan berbagai program kaderisasi. Melalui IPM, IMM, Pemuda Muhammadiyah, dan Nasyyatul Aisyiyah, generasi muda dibekali dengan pemahaman Islam berkemajuan yang seimbang antara teks dan konteks. Program ini tidak hanya membangun kesalehan pribadi, tetapi juga kepedulian sosial, kepemimpinan, dan wawasan kebangsaan. Dengan cara ini, moderasi ditanamkan sejak dini, sehingga anak muda tumbuh menjadi agen perdamaian.

Selain pendidikan formal, Muhammadiyah juga mengembangkan pendekatan dakwah kreatif yang sesuai dengan kultur generasi muda. Misalnya, melalui media sosial, podcast, vlog, atau diskusi santai di kafe dan komunitas. Dengan cara ini, anak muda merasa dekat dengan dakwah, karena disampaikan dengan bahasa dan gaya yang mereka pahami. Pendekatan kreatif ini terbukti lebih efektif dalam menarik perhatian generasi digital ketimbang ceramah tradisional yang monoton (Syafuruddin, 2020).

Minimnya pemahaman agama di kalangan generasi muda juga perlu ditanggapi dengan penguatan literasi digital. Muhammadiyah mendorong anak muda untuk kritis dalam mengonsumsi informasi daring. Mereka diajarkan untuk memverifikasi sumber, membandingkan tafsir, dan tidak mudah terprovokasi oleh konten yang menebar kebencian. Literasi digital ini menjadi benteng penting agar generasi muda tidak mudah terjerumus pada narasi intoleran.

Dengan semua upaya ini, tantangan minimnya pemahaman generasi muda memang berat, tetapi bukan tidak mungkin diatasi. Muhammadiyah Surabaya menunjukkan bahwa dengan kombinasi pendidikan, kaderisasi, pendekatan kreatif, dan literasi digital, generasi muda bisa diarahkan menjadi pilar moderasi. Mereka tidak hanya terbebas dari

pengaruh radikal, tetapi juga mampu menjadi duta Islam yang ramah, toleran, dan mencerahkan.

Distorsi Ajaran di Media Sosial

Di era digital, media sosial telah menjadi ruang baru bagi penyebaran gagasan keagamaan. Namun, ruang ini tidak selalu sehat. Banyak ajaran Islam yang terdistorsi karena dipotong dari konteks, disederhanakan secara berlebihan, atau bahkan dimanipulasi untuk kepentingan ideologis tertentu. Fenomena ini menjadi tantangan serius bagi moderasi beragama, termasuk di Surabaya yang merupakan salah satu kota dengan pengguna internet terbanyak di Indonesia.

Distorsi ajaran agama di media sosial biasanya berbentuk potongan ayat atau hadis yang dipakai untuk membenarkan pandangan intoleran. Misalnya, ayat-ayat tentang perang digunakan untuk menjustifikasi kekerasan, tanpa melihat konteks historis dan penafsiran ulama yang komprehensif. Akibatnya, ajaran Islam yang seharusnya membawa rahmat justru dipersepsikan sebagai ancaman (Hefner, 2019).

Selain itu, media sosial memberi ruang bagi siapa saja untuk tampil sebagai "ustaz instan." Mereka mungkin tidak memiliki latar belakang keilmuan yang memadai, tetapi dengan kemampuan retorika dan penguasaan teknologi, mereka bisa menggaet ribuan bahkan jutaan pengikut. Dalam kondisi minimnya literasi agama, masyarakat—terutama generasi muda—mudah menerima ajaran mereka tanpa kritis. Inilah yang membuat distorsi ajaran semakin cepat menyebar (Campbell & Tsuria, 2021).

Di Surabaya, dampak distorsi ini terlihat dalam meningkatnya polarisasi sosial. Perdebatan keagamaan di media sosial sering kali berakhir dengan saling hujat, bahkan permusuhan. Persoalan *furu'iyah* (cabang) seperti tata cara ibadah atau perbedaan mazhab dibesar-besarkan, seolah menjadi masalah akidah. Padahal, perbedaan dalam *fiqh* adalah

hal wajar dalam tradisi Islam. Polarisasi ini berbahaya karena bisa merembet ke kehidupan nyata, memecah belah umat yang sebelumnya hidup rukun.

Muhammadiyah memandang serius fenomena ini dan berusaha menghadirkan narasi alternatif. Aktivis muda Muhammadiyah Surabaya aktif memproduksi konten dakwah digital yang berbasis moderasi. Konten ini tidak hanya berisi ceramah, tetapi juga infografis, video edukatif, hingga diskusi daring. Dengan cara ini, media sosial tidak ditinggalkan begitu saja kepada kelompok intoleran, melainkan dijadikan medan dakwah yang produktif.

Selain produksi konten, Muhammadiyah juga mendorong kadernya untuk menjadi konsumen kritis di media sosial. Literasi digital digalakkan, agar umat tidak mudah percaya pada hoaks atau ajaran yang menyimpang. Di beberapa sekolah dan kampus Muhammadiyah, pelatihan literasi digital dimasukkan dalam program pembinaan siswa. Tujuannya jelas: menjadikan generasi muda mampu memilah dan memilih informasi, bukan sekadar menjadi korban arus digital.

Kolaborasi juga menjadi strategi penting. Muhammadiyah bekerja sama dengan pemerintah, platform digital, dan komunitas masyarakat untuk mengawasi penyebaran konten radikal. Upaya ini meliputi pelaporan akun bermuatan kebencian, sekaligus memperluas distribusi konten moderasi. Dengan jejaring yang luas, Muhammadiyah berusaha memastikan ruang digital tetap sehat bagi dakwah Islam yang damai.

Dengan demikian, distorsi ajaran di media sosial memang menjadi tantangan serius bagi moderasi beragama. Namun, tantangan ini sekaligus membuka peluang bagi Muhammadiyah untuk berinovasi dalam dakwah digital. Dengan strategi kreatif, literasi digital, dan kolaborasi lintas pihak, Muhammadiyah Surabaya berupaya memastikan bahwa wajah Islam yang tampil di media sosial adalah wajah Islam yang ramah, inklusif, dan mencerahkan.

Konflik Pendirian Rumah Ibadah

Konflik terkait pendirian rumah ibadah masih menjadi salah satu tantangan besar dalam membangun moderasi beragama di Indonesia, termasuk di Surabaya. Meskipun Indonesia menjamin kebebasan beragama dalam konstitusi, kenyataannya implementasi di lapangan sering menemui hambatan. Penolakan masyarakat, birokrasi yang berbelit, hingga provokasi kelompok intoleran kerap menjadi pemicu konflik yang memperkeruh hubungan antarumat beragama.

Di Surabaya, kasus pendirian rumah ibadah mencerminkan betapa sensitifnya persoalan ini. Penolakan sering kali bukan semata karena alasan teknis, tetapi lebih karena sentimen identitas dan prasangka antaragama. Ketika sebuah kelompok minoritas berusaha membangun rumah ibadah, kelompok lain khawatir akan "dominasi" atau "pengaruh" mereka di lingkungan sekitar. Akibatnya, rumah ibadah yang seharusnya menjadi ruang spiritual berubah menjadi titik api ketegangan sosial (Crouch, 2010).

Permasalahan ini semakin kompleks dengan adanya regulasi yang ambigu, seperti Peraturan Bersama Menteri (PBM) 2006 tentang pendirian rumah ibadah. Regulasi ini sering ditafsirkan secara ketat hingga membatasi hak kelompok tertentu untuk membangun tempat ibadah. Di satu sisi, regulasi bertujuan menjaga harmoni, tetapi di sisi lain justru membuka ruang bagi mayoritas untuk menghambat minoritas. Kondisi inilah yang menjadi tantangan bagi moderasi beragama di tingkat lokal.

Bagi Muhammadiyah, konflik pendirian rumah ibadah bukan hanya soal teknis administratif, tetapi juga soal prinsip kebebasan beragama yang dijamin Islam dan konstitusi. Muhammadiyah menegaskan bahwa setiap umat berhak memiliki tempat ibadah yang layak. Hal ini sejalan dengan prinsip tasamuh (toleransi) dan i'tidal (keadilan) dalam moderasi

beragama. Dengan sikap ini, Muhammadiyah berusaha menjadi penengah dalam konflik rumah ibadah.

Di Surabaya, tokoh-tokoh Muhammadiyah kerap terlibat aktif dalam mediasi konflik pendirian rumah ibadah melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Pendekatan dialogis digunakan untuk mengurangi ketegangan, dengan mengedepankan musyawarah dan kompromi. Muhammadiyah berperan penting dalam menjelaskan bahwa keberadaan rumah ibadah kelompok lain tidak mengurangi iman umat Islam, tetapi justru memperkuat nilai kebersamaan dalam masyarakat plural.

Selain mediasi, Muhammadiyah juga menekankan pentingnya edukasi publik. Konflik rumah ibadah sering kali berakar dari ketidaktahuan masyarakat tentang ajaran agama lain dan kurangnya komunikasi antarwarga. Dengan program-program dakwah bil-hal, Muhammadiyah menunjukkan bahwa toleransi dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika umat terbiasa bekerja sama dalam bidang sosial, prasangka terhadap rumah ibadah kelompok lain akan berkurang.

Namun demikian, tantangan tetap ada. Kelompok intoleran kerap memanfaatkan isu rumah ibadah untuk memperkuat basis dukungan mereka. Dengan retorika “menjaga kemurnian iman,” mereka menolak pembangunan rumah ibadah lain dan memprovokasi masyarakat. Dalam konteks ini, Muhammadiyah perlu memperkuat narasi alternatif bahwa menjaga iman tidak harus berarti menutup diri, melainkan justru menghargai hak-hak pihak lain.

Dengan demikian, konflik pendirian rumah ibadah adalah tantangan nyata bagi moderasi beragama di Surabaya. Tetapi dengan peran mediasi, edukasi, dan dakwah bil-hal, Muhammadiyah mampu menghadirkan solusi yang konstruktif. Upaya ini tidak hanya menjaga kerukunan lokal, tetapi juga memperlihatkan kepada publik bahwa Islam moderat benar-benar hadir untuk membangun harmoni dalam keberagaman.

Strategi Menghadapi Tantangan

Berbagai tantangan yang dihadapi dakwah moderat Muhammadiyah di Surabaya—mulai dari munculnya kelompok beraliran keras, minimnya pemahaman generasi muda, distorsi ajaran di media sosial, hingga konflik pendirian rumah ibadah—menuntut strategi yang komprehensif. Tanpa strategi yang terarah, moderasi beragama hanya akan berhenti sebagai wacana, tidak menjadi gerakan yang nyata. Oleh karena itu, Muhammadiyah mengembangkan pendekatan multi-dimensi yang mencakup pendidikan, dakwah, sosial, budaya, dan advokasi kebijakan publik.

Pertama, penguatan pendidikan menjadi kunci utama. Muhammadiyah memanfaatkan jaringan sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi untuk menanamkan nilai moderasi sejak dini. Pendidikan agama diberikan secara mendalam, tetapi tetap sejalan dengan nilai kebangsaan dan keterbukaan global. Melalui kurikulum yang berorientasi pada Islam berkemajuan, Muhammadiyah berusaha mencetak generasi yang beriman kuat, berilmu, dan siap hidup berdampingan dalam keberagaman (Nashir, 2010).

Kedua, dakwah digital dikembangkan untuk menghadapi tantangan distorsi ajaran di media sosial. Muhammadiyah Surabaya melatih kader mudanya untuk menjadi kreator konten yang mampu menyebarkan pesan Islam damai secara menarik dan mudah dipahami. Strategi ini penting agar ruang digital tidak dikuasai kelompok intoleran, melainkan menjadi ladang subur bagi pesan moderasi dan pencerahan.

Ketiga, penguatan kaderisasi generasi muda dilakukan secara berkesinambungan melalui organisasi otonom seperti IPM, IMM, Pemuda Muhammadiyah, dan Nasyyatul Aisyiyah. Melalui pelatihan kepemimpinan, diskusi, dan aksi sosial, generasi muda tidak hanya dilatih menjadi pemimpin masa depan, tetapi juga duta moderasi yang siap menghadapi tantangan ideologi keras (Azra, 2002).

Keempat, pendekatan dialogis dan mediasi konflik terus dikembangkan, terutama melalui peran Muhammadiyah dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Dengan posisi ini, Muhammadiyah bisa terlibat langsung dalam meredakan konflik, termasuk terkait rumah ibadah. Pendekatan dialogis ini menegaskan bahwa Islam tidak anti-dialog, melainkan menjadikan musyawarah sebagai jalan utama menyelesaikan perbedaan.

Kelima, pemberdayaan sosial-ekonomi menjadi strategi penting menghadapi radikalisme. Banyak kelompok beraliran keras tumbuh subur di kalangan masyarakat yang terpinggirkan secara ekonomi. Dengan menghadirkan program pemberdayaan, seperti pelatihan kerja, koperasi, dan bantuan sosial, Muhammadiyah berusaha mengurangi lahan subur radikalisme. Dakwah bil-hal ini membuktikan bahwa Islam hadir untuk solusi nyata, bukan sekadar retorika.

Keenam, advokasi kebijakan publik juga menjadi strategi jangka panjang. Muhammadiyah Surabaya aktif menyuarakan pentingnya kebijakan yang mendukung kerukunan umat beragama, pendidikan moderasi, dan penegakan hukum terhadap intoleransi. Dengan keterlibatan dalam ruang kebijakan, Muhammadiyah tidak hanya bergerak di level masyarakat, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk regulasi yang lebih adil dan inklusif.

Dengan strategi-strategi tersebut, Muhammadiyah tidak hanya bertahan menghadapi tantangan, tetapi juga mengubahnya menjadi peluang untuk memperkuat posisi Islam moderat di Surabaya. Tantangan yang ada justru semakin meneguhkan peran Muhammadiyah sebagai benteng moderasi, sekaligus motor pencerahan. Strategi ini membuktikan bahwa moderasi bukan sikap lemah, melainkan kekuatan moral dan intelektual untuk membangun peradaban yang damai dan adil.

Bab 7

Inspirasi dari Surabaya

Kisah Sukses Kerukunan Umat Beragama

Surabaya sering dijadikan contoh kota yang berhasil membangun kerukunan umat beragama di tengah kompleksitas keberagaman. Padahal, kota ini pernah mengalami tragedi yang menguji harmoni sosial, yakni peristiwa bom gereja pada 2018. Namun, dari luka mendalam itu lahir kesadaran kolektif untuk memperkuat toleransi. Kisah sukses kerukunan di Surabaya bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan hasil dari kerja keras, kolaborasi, dan komitmen berbagai pihak, termasuk ormas Islam seperti Muhammadiyah.

Salah satu wujud nyata kerukunan di Surabaya adalah solidaritas lintas agama dalam peristiwa bencana dan krisis. Misalnya, ketika terjadi pandemi COVID-19, umat beragama bersama-sama menggalang bantuan sosial tanpa membedakan latar belakang. Gereja, masjid, vihara, dan klenteng menjadi pusat distribusi bantuan bagi siapa saja yang membutuhkan. Solidaritas semacam ini memperlihatkan bahwa nilai kemanusiaan mampu menjembatani perbedaan teologis (Azra, 2020).

Kisah sukses lainnya adalah kegiatan kebudayaan bersama yang melibatkan komunitas lintas iman. Festival budaya, perayaan hari besar nasional, dan kegiatan seni di ruang publik sering dijadikan ajang untuk memperkuat kebersamaan. Dalam acara-acara semacam ini, masyarakat belajar bahwa keragaman tidak perlu ditakuti, melainkan bisa dirayakan bersama. Surabaya menunjukkan bahwa kota besar dengan heterogenitas tinggi dapat tetap solid jika dikelola dengan bijak.

Keberhasilan kerukunan di Surabaya juga ditopang oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Forum ini berfungsi sebagai wadah dialog, mediasi, sekaligus kolaborasi lintas agama. Ketika ada potensi konflik, FKUB menjadi ruang untuk duduk bersama mencari solusi damai. Muhammadiyah memainkan peran penting dalam forum ini, dengan

menghadirkan perspektif Islam moderat yang inklusif dan dialogis.

Selain itu, sekolah dan kampus Muhammadiyah turut menjadi laboratorium kerukunan. Siswa dan mahasiswa dari berbagai latar belakang diajarkan pentingnya toleransi melalui interaksi sehari-hari dan kurikulum pendidikan berkemajuan. Hal ini menjadikan lembaga pendidikan Muhammadiyah bukan hanya tempat transfer ilmu, tetapi juga arena pembentukan karakter multikultural.

Kisah sukses lain terlihat dalam penanganan isu rumah ibadah. Di beberapa tempat, pendirian rumah ibadah bisa memicu konflik. Namun di Surabaya, mediasi dan dialog yang intensif membuat masalah tersebut bisa diselesaikan dengan lebih damai. Muhammadiyah bersama tokoh-tokoh agama lain berperan aktif untuk memastikan bahwa hak beribadah dihormati dan perbedaan tidak dijadikan alasan untuk saling menutup diri (Crouch, 2010).

Yang menarik, kerukunan di Surabaya tidak hanya sebatas harmoni formal, tetapi juga hidup dalam keseharian warga. Pasar tradisional, ruang kerja, hingga kampung-kampung menjadi tempat perjumpaan lintas agama yang penuh keakraban. Dalam interaksi sehari-hari, warga terbiasa saling menolong, tanpa mempertanyakan keyakinan masing-masing. Nilai gotong royong inilah yang membuat kerukunan di Surabaya kokoh, meskipun sesekali diguncang oleh isu intoleransi.

Dari semua kisah sukses ini, tampak jelas bahwa kerukunan bukanlah sesuatu yang statis. Ia harus terus dipelihara melalui dialog, kerja sama, dan pendidikan. Surabaya membuktikan bahwa dengan keterlibatan ormas Islam moderat seperti Muhammadiyah, kerukunan umat beragama bukan sekadar mimpi, melainkan kenyataan yang bisa diwujudkan. Kisah Surabaya menjadi inspirasi bahwa luka bisa berubah menjadi kekuatan, dan perbedaan bisa menjadi modal untuk membangun harmoni.

Peran Elit Muhammadiyah dalam Merajut Toleransi

Kerukunan umat beragama di Surabaya tidak bisa dilepaskan dari peran para elit Muhammadiyah. Mereka adalah tokoh yang tidak hanya memimpin organisasi, tetapi juga menjadi jembatan antara umat Islam dengan kelompok agama lain serta pemerintah daerah. Dengan visi Islam berkemajuan, para elit Muhammadiyah menampilkan wajah agama yang ramah, inklusif, dan konstruktif dalam merawat kebhinekaan.

Pertama, peran elit Muhammadiyah tampak dalam fungsi advokasi kebijakan publik. Melalui jaringan akademisi, birokrat, dan tokoh masyarakat, mereka aktif mendorong lahirnya kebijakan yang mendukung kerukunan, seperti penguatan pendidikan moderasi dan perlindungan hak-hak minoritas beragama. Keterlibatan ini memastikan bahwa moderasi beragama tidak hanya menjadi jargon, tetapi masuk dalam praktik pemerintahan (Nashir, 2010).

Kedua, para elit Muhammadiyah berperan sebagai mediator dalam konflik sosial-keagamaan. Misalnya, ketika ada gesekan dalam pendirian rumah ibadah atau ketegangan antarwarga, tokoh Muhammadiyah sering dipercaya hadir sebagai penengah. Reputasi mereka sebagai tokoh moderat membuat kedua belah pihak lebih mudah menerima jalan tengah. Peran ini penting karena menunjukkan bahwa Islam bisa menjadi kekuatan perdamaian, bukan sumber pertentangan (Crouch, 2010).

Ketiga, elit Muhammadiyah juga memiliki kontribusi besar dalam dakwah lintas iman. Mereka sering hadir dalam forum-forum kerukunan, dialog antaragama, dan kegiatan sosial bersama komunitas lain. Kehadiran tersebut bukan untuk mengaburkan identitas Islam, melainkan memperkuat pesan bahwa Islam sejati menjunjung tinggi persaudaraan kemanusiaan. Dengan cara ini, Muhammadiyah membangun jembatan emosional dan intelektual antarumat beragama.

Keempat, keteladanan pribadi para elit Muhammadiyah memberi dampak signifikan. Gaya hidup sederhana, kepedulian sosial, dan sikap terbuka mereka menjadi contoh nyata bagaimana Islam dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Keteladanan ini menguatkan kepercayaan masyarakat lintas agama, bahwa elit Muhammadiyah benar-benar konsisten dengan nilai-nilai toleransi yang mereka dakwahkan.

Kelima, peran elit Muhammadiyah terlihat dalam pemberdayaan masyarakat. Melalui sekolah, rumah sakit, dan program sosial, Muhammadiyah menunjukkan bahwa pelayanan publik tidak hanya diberikan kepada umat Islam, tetapi untuk semua. Layanan kesehatan Muhammadiyah, misalnya, banyak diakses oleh warga non-Muslim di Surabaya. Praktik inklusif ini menjadi dakwah nyata yang merajut toleransi tanpa banyak kata.

Keenam, elit Muhammadiyah memanfaatkan media dan ruang digital untuk memperkuat toleransi. Mereka aktif menulis opini di surat kabar, berbicara di televisi, dan mengisi ruang publik dengan narasi moderasi. Bahkan, sebagian mulai menggunakan media sosial untuk menjangkau generasi muda. Dengan cara ini, wacana toleransi tidak hanya hidup di ruang akademis, tetapi juga hadir di ruang populer yang dekat dengan masyarakat.

Akhirnya, peran elit Muhammadiyah dalam merajut toleransi membuktikan bahwa kepemimpinan keagamaan sangat menentukan arah kehidupan sosial. Ketika elit mengambil sikap moderat, umat akan lebih mudah diarahkan menuju kerukunan. Sebaliknya, jika elit justru menyebarkan narasi intoleran, masyarakat akan terpolarisasi. Surabaya memberi pelajaran bahwa keberhasilan kerukunan tidak lepas dari konsistensi dan visi inklusif para elit Muhammadiyah dalam membumikan Islam berkemajuan.

Pelajaran bagi Kota-Kota Lain di Indonesia

Pengalaman Surabaya dalam membangun moderasi beragama menyimpan banyak pelajaran berharga yang bisa dijadikan rujukan oleh kota-kota lain di Indonesia. Sebagai kota besar dengan heterogenitas tinggi, Surabaya berhasil menunjukkan bahwa keragaman agama dan budaya bukan penghalang, melainkan modal sosial untuk memperkuat kebersamaan. Dari sinilah lahir inspirasi bagi daerah lain dalam merawat kerukunan.

Pelajaran pertama adalah pentingnya kolaborasi lintas agama dan lintas institusi. Surabaya membuktikan bahwa kerukunan tidak bisa dibangun oleh satu pihak saja. Pemerintah, ormas keagamaan, tokoh masyarakat, dan komunitas lintas iman harus bekerja bersama. Kolaborasi ini membuat penyelesaian konflik lebih cepat dan efektif, sekaligus menumbuhkan rasa saling percaya antarwarga (Azra, 2020).

Pelajaran kedua adalah peran strategis elit agama moderat. Keberhasilan Surabaya tidak lepas dari kontribusi tokoh Muhammadiyah yang konsisten menyuarakan toleransi. Ini memberi pesan bahwa kepemimpinan moral sangat menentukan arah masyarakat. Kota lain bisa belajar, bahwa membangun kerukunan memerlukan figur-figur agama yang kredibel, inklusif, dan dekat dengan umat (Nashir, 2010).

Pelajaran ketiga, Surabaya mengajarkan pentingnya pendidikan multikultural. Sekolah dan kampus Muhammadiyah telah menjadi laboratorium kerukunan, tempat generasi muda belajar menerima perbedaan. Kota lain bisa mengadopsi pendekatan serupa, yakni memasukkan nilai toleransi dalam kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, dan interaksi sehari-hari di lembaga pendidikan.

Pelajaran keempat adalah pemanfaatan ruang digital. Surabaya menunjukkan bagaimana Muhammadiyah menggunakan media sosial untuk menyebarkan narasi Islam moderat. Di era disrupsi informasi, kota-kota lain juga perlu

menjadikan media digital sebagai ruang dakwah kreatif agar tidak dikuasai kelompok intoleran. Dakwah moderasi harus hadir di ruang yang sama dengan generasi muda, yakni ruang maya (Campbell & Tsuria, 2021).

Pelajaran kelima adalah pentingnya mekanisme dialog dan mediasi. Konflik agama tidak bisa dihindari sepenuhnya, tetapi bisa dikelola. Surabaya melalui FKUB memberi contoh bahwa dengan komunikasi terbuka, ketegangan bisa diselesaikan tanpa kekerasan. Kota-kota lain bisa memperkuat lembaga serupa, sekaligus melibatkan ormas Islam moderat dalam proses mediasi.

Pelajaran keenam adalah pemberdayaan sosial-ekonomi sebagai basis kerukunan. Surabaya memperlihatkan bahwa dakwah bil-hal—seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial—mampu mempererat hubungan antarumat. Kota lain bisa mengembangkan program serupa, karena harmoni sosial akan lebih kokoh jika didukung kesejahteraan bersama.

Akhirnya, pelajaran paling penting dari Surabaya adalah bahwa kerukunan harus dikelola secara aktif. Ia tidak lahir secara otomatis, melainkan melalui pendidikan, dialog, kolaborasi, dan kepemimpinan moral. Jika Surabaya yang penuh keragaman mampu merawat toleransi, maka kota-kota lain pun memiliki peluang yang sama, asalkan ada komitmen kolektif untuk menjadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan bersama.

Bab 8

Penutup: Menyemai Moderasi
untuk Masa Depan

Ringkasan dan Refleksi

Buku ini telah menelusuri perjalanan panjang upaya membangun moderasi beragama di Surabaya, dengan menyoroti peran strategis elit Muhammadiyah. Dari Bab 1 hingga Bab 7, kita melihat bagaimana moderasi beragama bukan sekadar konsep abstrak, melainkan praktik nyata yang berakar dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik. Moderasi hadir bukan hanya untuk menjawab tantangan radikalisme, tetapi juga untuk memperkuat kohesi sosial di tengah keberagaman Indonesia.

Ringkasnya, Bab 1 memperlihatkan latar belakang mengapa moderasi beragama begitu mendesak di Indonesia, terutama di Surabaya. Dengan sejarah kelam tragedi bom, kota ini dipaksa untuk belajar bahwa intoleransi hanya melahirkan luka, sedangkan moderasi membuka jalan menuju pemulihan. Bab 2 kemudian menegaskan bahwa Muhammadiyah, dengan sejarah dan tradisi dakwahnya, memiliki modal ideologis dan struktural untuk menjadi agen utama dalam menyebarkan Islam wasathiyah.

Selanjutnya, Bab 3 membentangkan dasar teologis moderasi beragama dalam Islam, mulai dari Al-Qur'an, hadis, hingga nilai inti seperti tawassuth, i'tidal, tasamuh, dan ishlah. Nilai-nilai ini tidak berhenti di tataran doktrin, melainkan diwujudkan dalam strategi dakwah. Hal ini dijelaskan dalam Bab 4, yang memperlihatkan bagaimana Muhammadiyah Surabaya mengembangkan dakwah bil-lisan, bil-hal, bil-qalam, hingga dakwah dialogis melalui FKUB, sambil menjangkau generasi muda dengan cara-cara kreatif.

Bab 5 kemudian menyajikan model internalisasi moderasi beragama yang berlandaskan pada teologi, kelembagaan, identitas keislaman, dan pendekatan inklusif. Model ini membuktikan bahwa moderasi tidak dapat sekadar dipaksakan dari luar, melainkan harus diinternalisasi dalam jiwa dan organisasi umat. Tantangan di lapangan yang dijabarkan dalam

Bab 6 memperlihatkan betapa kompleksnya situasi: kelompok keras, minimnya literasi generasi muda, distorsi ajaran di media sosial, hingga konflik rumah ibadah. Semua ini menuntut strategi cerdas dan kolaboratif.

Pada gilirannya, Bab 7 menghadirkan inspirasi dari Surabaya. Kisah sukses kerukunan, peran tokoh Muhammadiyah, dan pelajaran berharga bagi kota-kota lain menunjukkan bahwa moderasi beragama bukanlah utopia. Ia bisa diwujudkan jika ada komitmen, kerja sama, dan kepemimpinan moral yang konsisten. Surabaya dengan segala kompleksitasnya justru membuktikan bahwa luka bisa berubah menjadi energi positif untuk membangun harmoni.

Refleksi dari perjalanan ini adalah bahwa moderasi beragama sejatinya bukanlah “jalan tengah” dalam arti kompromi lemah, melainkan jalan utama Islam yang otentik. Moderasi adalah kekuatan spiritual dan sosial yang menegakkan keadilan, menghormati perbedaan, dan menolak kekerasan. Dalam konteks Indonesia, moderasi bukan hanya kebutuhan, tetapi fondasi untuk menjaga persatuan bangsa yang majemuk (Azra, 2020).

Moderasi juga menuntut keberanian intelektual dan moral. Intelektual, karena ia membutuhkan pemahaman agama yang komprehensif; moral, karena ia menuntut keteladanan dalam tindakan. Tanpa keduanya, moderasi hanya menjadi jargon kosong. Muhammadiyah di Surabaya telah menunjukkan bahwa moderasi bisa dihidupkan melalui pendidikan, pelayanan sosial, dan keterlibatan aktif dalam ruang publik.

Refleksi terakhir yang dapat ditarik adalah bahwa moderasi beragama harus terus-menerus disemai, karena tantangan intoleransi tidak pernah benar-benar hilang. Dunia digital, globalisasi, dan dinamika politik akan selalu menghadirkan ancaman baru. Namun, dengan fondasi teologis yang kuat, strategi dakwah kreatif, serta kepemimpinan yang visioner, moderasi beragama dapat menjadi benteng

peradaban. Surabaya memberi pesan bahwa masa depan Indonesia akan cerah jika moderasi dijadikan jalan bersama.

Rekomendasi untuk Masyarakat, Pemerintah, dan Organisasi Keagamaan

Membangun moderasi beragama bukan hanya tugas ormas Islam seperti Muhammadiyah, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa. Tantangan intoleransi, radikalisme, dan polarisasi sosial menuntut kerja sama lintas sektor yang konsisten. Karena itu, penting merumuskan rekomendasi praktis yang bisa dijalankan oleh masyarakat, pemerintah, dan organisasi keagamaan.

Pertama, untuk masyarakat, perlu ditumbuhkan budaya literasi agama dan digital. Banyaknya distorsi ajaran di media sosial hanya bisa diatasi jika masyarakat terbiasa berpikir kritis. Literasi agama akan membuat umat tidak mudah terjebak dalam tafsir sempit, sementara literasi digital membantu mereka memilah informasi yang benar dari yang palsu. Masyarakat juga perlu aktif dalam ruang-ruang dialog di lingkungan sekitar, agar perbedaan tidak berkembang menjadi prasangka atau konflik.

Kedua, bagi generasi muda, penting diberikan ruang untuk ekspresi kreatif dalam dakwah moderat. Mereka adalah pengguna utama media sosial dan sekaligus target kelompok intoleran. Jika diberi wadah untuk memproduksi konten positif, generasi muda bisa menjadi garda terdepan dalam melawan narasi radikal. Sekolah, kampus, dan komunitas pemuda harus menjadi laboratorium toleransi yang hidup, bukan sekadar tempat belajar formal (Campbell & Tsuria, 2021).

Ketiga, untuk pemerintah, diperlukan komitmen politik yang kuat dalam mendukung moderasi beragama. Hal ini mencakup regulasi yang adil dalam pendirian rumah ibadah, kebijakan pendidikan yang multikultural, serta penegakan

hukum yang tegas terhadap intoleransi. Pemerintah juga perlu memperkuat peran FKUB di daerah, agar forum ini tidak hanya menjadi simbol, melainkan benar-benar efektif sebagai mediator konflik (Crouch, 2010).

Keempat, pemerintah perlu menggandeng ormas Islam moderat seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebagai mitra strategis dalam pembangunan bangsa. Kedua ormas ini memiliki basis massa yang besar, jaringan pendidikan dan sosial yang luas, serta visi keagamaan yang inklusif. Dengan kolaborasi, kebijakan publik yang pro-kerukunan bisa lebih mudah diimplementasikan di lapangan (Azra, 2020).

Kelima, bagi organisasi keagamaan, penting untuk memperkuat kaderisasi tokoh moderat. Elit agama berperan besar dalam membentuk opini umat. Jika para tokoh konsisten menyuarakan toleransi, umat akan lebih mudah diarahkan menuju kerukunan. Kaderisasi ini perlu menysasar generasi muda agar kesinambungan moderasi tetap terjaga di masa depan.

Keenam, ormas keagamaan juga disarankan untuk lebih aktif dalam mengisi ruang digital. Dakwah moderasi tidak cukup berhenti di masjid, pengajian, atau forum akademik, tetapi harus hadir di media sosial, podcast, YouTube, dan platform digital lainnya. Dengan begitu, Islam moderat bisa bersaing dengan narasi intoleran yang kerap mendominasi ruang maya.

Ketujuh, baik masyarakat, pemerintah, maupun organisasi keagamaan, semuanya harus mengedepankan pendekatan dialogis dan kemanusiaan dalam menghadapi perbedaan. Kerukunan tidak bisa dipaksakan dengan kekuatan hukum semata, melainkan perlu dibangun melalui komunikasi yang jujur, rasa saling menghormati, dan kerja sama dalam persoalan kemanusiaan.

Akhirnya, rekomendasi ini menegaskan bahwa moderasi beragama bukan hanya proyek jangka pendek, tetapi investasi peradaban untuk masa depan Indonesia. Jika masyarakat,

pemerintah, dan ormas Islam bekerja bersama, maka moderasi tidak hanya menjadi slogan, tetapi akan menjelma menjadi kenyataan sosial. Surabaya telah membuktikan hal itu; kini saatnya kota-kota lain di Indonesia mengambil pelajaran dan mengaplikasikannya sesuai konteks lokal masing-masing.

Daftar Pustaka

- Adibah, I. Z. (2017). Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam. *Jurnal Inspirasi*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.61689/inspirasi.v1i1.1>.
- Ahmad, A. (1989). *Dakwah Islam dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Prima Duta.
- Ahmad, M. R. (2018). Kasus Penistaan/Penodaan Agama di Indonesia Perspektif Elit Muhammadiyah Surabaya. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia ' S Diversity. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2), 45–55. <https://doi.org/https://doi.org/DOI:10.52266/tadjud.v6i2.1065>
- Al- Hariri, M. A. M., Ma'rif, M. A., & Huda, S. A. (2024). Moderasi Beragama: Peluang dan Tantangan di Era Digital. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 5(02), 151–159. <https://doi.org/https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>
- Albana, H. (2023). Implementasi Pendidikan Moderasi Beragama di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 9(1), 49–64. <https://doi.org/10.18784/smart.v9i1.1849>
- Aldiansyah, M. N. (2021). Implementasi Sikap Toleransi Antar Umat Beragama (Studi Kasus di Kelurahan Babatan Kota Surabaya Tahun 2020-2021). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Alfian. (1989). *Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization under Dutch Colonialism*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Alimuddin, N. (2007a). Konsep Dakwah dalam Islam. *Jurnal Hunafa*, 4(1), 73–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/jsi.v4i1.195.73-78>
- Alimuddin, N. (2007b). Konsep Dakwah dalam Islam. *Jurnal Hunafa*, 4(1), 73–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/jsi.v4i1.195.73-78>
- Amin, S. (2023). Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama melalui Ajaran Kerohanian Persaudaraan Setia Hati Terate Komisariat IAIN Ponorogo. IAIN Ponorogo.
- Amin, S. M. (2009). *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Amzah.
- Andrianto, D. (2023). Strategi Penanaman Nilai-nilai Moderasi Beragama di MA Bilingual Batu Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

- Ansori, T. (2019). Revitalisasi Dakwah Sebagai Paradigma Pemberdayaan Masyarakat. *Muharrrik: Jurnal Dakwah Dan Sosial*, 2(1), 33–44. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3544714>
- Arbi, Herlina, & Hanafi, I. (2022). Membangun Dari Dalam; Penguatan Moderasi Beragama melalui Pendekatan Living Values Education (LVE) Bagi Mahasiswa Ma'had Al-Jami'ah UIN Suska Riau. *The 4th International Conference on University-Community Engagement (ICON-UCE)*, 90–100.
- Arif, K. M. (2020). Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-Qur'an, As-Sunnah serta Pandangan Para Ulama dan Fuqaha. *Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 11(1), 22–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.34005/alrisalah.v1i1.592>
- Arif, K. M. (2021). Concept And Implementation Of Religious Moderation In Indonesia. *Al-Risalah*, 12(1), 90–106. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v2i1.1212>
- Arifianto, A. R. (2020). Rising Islamism and the Struggle for Islamic Authority in Post-Reformasi Indonesia. *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia*, 8(1), 37–50. <https://doi.org/10.1017/trn.2019.10>
- Arifin, P. (2023). Praktik Komunikasi Partisipatif Warga RW 20 Kampung Sutodirjan Kota Yogyakarta pada Program Pembangunan Komunitas Lokal. *Jurnal Komunikasi Pemberdayaan*, 2(2), 97–106. <https://doi.org/https://jurnal.apmd.ac.id/index.php/JKP/article/download/340/208/1123>
- Arikunto, S. (1989). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*. PT. Bima Karya.
- Ash-Shallabi, A. M. (2020). *Wasathiyah Dalam Al-Qur'an Nilai-Nilai Moderasi Islam Dalam Akidah, Syariat, dan Akhlak* (1st ed.). Pustaka Al-Kautsar.
- Azis, A. A., Masykhur, A., Anam, A. K., Muhtarom, A., Masudi, I., & Duryat, M. (2019). Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam (P. Supriatna, A. Nuryanto, & Saepullah, Eds.; cetakan 1). *Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia*.
- Aziz, M. A. (2011). Eksistensi Fakultas Dakwah di Indonesia Mengurai, Problematika, Menemukan Solusi. *Ciputat: Sentra Media*.
- Bashori, A. D. (2013). Konsep Moderat Yusuf Qardhawi Tolak Ukur Moderasi dan Pemahaman Terhadap Nash. *Dialog: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keagamaan*, 36(1), 1–18. <https://doi.org/10.47655/dialog.v36i1.73>.
- Belwawin, H., & Abineno, F. O. (2023). Implikasi Pendidikan Keagamaan Terhadap Moderasi Beragama di SMTK Marturia Sentani Kabupaten Jayapura Tahun

2022. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 8(1), 19–28.
<https://doi.org/10.47313/pjsh.v8i1.1909>.
- Bottomore, T. B. Terj. A. H. (2006). *Elite dan Masyarakat* (M. A. Alfian, Ed.). Akbar Tandjung Institute.
- Bungin, B. (2012). *Penelitian Kualitatif*. Kencana.
- Burhani, A. N. (2019). *Trends in Southeast Asia* (A. N. Burhani, Ed.; 1st ed.). ISEAS Publishing.
- Burhani, A. N., & Khoirudin, A. (2016). *Muhammadiyah berkemajuan : pergeseran dari puritanisme ke kosmopolitanisme / Ahmad Najib Burhani ; editor, Azaki Khoirudin (1st ed.)*. Mizan Pustaka.
- Burhani, A. N., & Khoirudin, A. (2016). *Muhammadiyah Berkemajuan: Pergeseran dari Puritanisme ke Kosmopolitanisme*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Choirah, W. N., & Munawir. (2023). *Metodologi Pemahaman Hadis M . Yusuf al-Qaradhawi : Studi Analitis Atas Hadis Partisipasi Wanita Dalam Berpolitik. Studi Al-Qur'an Dan Hadis*, 1(1), 61–74.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/alqudwah.v1i1.22817> Metodologi
- Creswell, J. W., & Poth, W. C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Sage Publishing.
- Daradjat, Z. (2010). *Kesehatan Mental*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Fahrurrozi. (2017). *Model-model Dakwah di Era Kontemporer (LP2M UIN MATARAM, Ed.)*. Mataram.
- Fradana, A. N., & Ahfas, A. (2020). *Muhammadiyah Urban: Akselerasi Gerakan Muhammadiyah Gresik Kota Baru*. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 16(1), 52–60. [10.23971/jsam.v16i1.1875](https://doi.org/10.23971/jsam.v16i1.1875).
- Hamali, S. (2017). *Agama dalam Perspektif Sosiologis*. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 12(2), 86–105. <https://doi.org/DOI:10.24042/ajsia.v12i2.2111>
- Hamidah, L. N., & Achmad, S. (2022). *Implementation of Religious Moderation Values in College Students*. *Al-Iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 7(2), 44–56.
<https://doi.org/10.33477/alt.v7i2.3366>
- Hamna, D. M. (2018). *Konvergensi Media Terhadap Kinerja Jurnalis (Studi Kasus: Fajar Tv Dan Fajar Fm)*. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 19(1), 58–83.
<https://doi.org/10.24252/jdt.v19i1.5911>
- Haris, M. A., Djumhur Salikin, A., Sahrodi, J., & Fatimah, S. (2023). *Religious Moderation among the Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah*. *International Journal of Social Science And Human Research*, 6(1), 479–486.
<https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i1-63>

- Harming. (2021). Berbagai Pendekatan Komunikasi Lintas Budaya Bagi Masyarakat Dayak. *Jurnal Teologi Praktika*, 2(1), 29–41. <https://doi.org/10.51465/jtp.v2i1.27>
- Hasanuddin, & Ginting, N. (2021). Strengthening Religious Moderation Literacy For Muhammadiyah Citizens, In The Leaders Of The Muhammadiyah Branch. Medan City, North Sumatera Indonesia. *International Journal Of Community Service*, 1(3), 217–224. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i3.49>
- Hayati, N. E. R. (2022). Konsep dan Implementasi Moderasi Beragama dalam Meningkatkan Sikap Sosio-Religius dan Toleransi Beragama di Universitas Merdeka Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Heriadi, Romelah, & Hakim, M. N. (2024). Gerakan Tajdid Sebagai Respon Perubahan Sosial Masyarakat di Jamaaan Masjid Darul Hikmah Muhammadiyah Ponorogo. *Jurnal Kemuhammadiyah Dan Integrasi Ilmu*, 1(3), 136–147. <https://doi.org/https://jurnal.umj.ac.id/index.php/JKII/index>
- Hs, M. A. (2021). Moderasi Beragama Muhammadiyah Dalam Kajian Kesarjanaan Indonesia: Antara Studi Dan Dakwah Islam. *Artikel Utama 79 MAARIF*, 16(1), 79–97. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.47651/mrf.v16i1.135>
- Huda, N., Hamid, N., & Misbah, M. K. (2020). Konsep Wasathiyah M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah (Analisis Hermeneutika Hans-Georg Gadamer). *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din*, 22(2). <https://doi.org/10.21580/ihya.22.2.6768>
- Ibnu Kasir, & Syahrol Awali. (2024). Peran Dakwah Digital dalam Menyebarkan Pesan Islam di Era Modern. *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta*, 11(1), 59–68. <https://doi.org/https://ejournal.unisai.ac.id/index.php/jian/article/download/842/682/3426>
- Irmayanti, A., & Saidah, M. (2024). Difusi Inovasi Dakwah Digital pada Komunitas @Remisyaoofficial di Instagram dalam Mempersuasi Program Dakwah di Kalangan Remaja. *Jurnal Medium*, 11(2), 192–212. <https://doi.org/https://journal.uir.ac.id/index.php/Medium/article/download/19557/7555/72813>
- Islahuddin, M., Romelah, & Nurhakim, M. (2023). Moderasi Muhammadiyah dalam Bingkai Dakwah Kultural. *Tamaddun: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Keagamaan*, 24(1), 6–16. <http://journal.umg.ac.id/index.php/tamaddun>
- Jawa Timur, P. (2020). *Gerakan Pencerahan Muhammadiyah di Jawa Timur*. Surabaya: PWM Press.

- Kassab, S. A. (2010). *Metode dakwah Yusuf Al-Qaradhawi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Kemenag RI. (2019). *Moderasi Beragama* (R. Kementrian Agama, Ed.; 1st ed.). Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Khoiri, N. (2019). *Radikalisme Agama dalam Pandangan Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama* (A. Luthfan, Ed.; cetakan 1). Southeast Asian Publishing.
- Kleden, P. B. (2019). *Berfilsafat Dan Berteologi Di Indonesia*. *Jurnal Ledalero*, 18(2). <https://doi.org/10.31385/jl.v18i2.184.150-182>
- Klikmu. (2023). *Sejarah Muhammadiyah Surabaya*.
- Latif, H., & dkk. (2024). *Jalan Baru Moderasi Beragama; Menyukuri 66 Tahun Haidar Nashir* (F. R. Ul Haq & A. Khoirudin, Eds.). PT. Kompas Media Nusantara.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Sage Publication.
- Lofland, J., Snow, D., Anderson, L., & Wysocki, D. Kholos. (2006). *Analyzing Social Settings a Guide to Qualitative Observation and Analysis*. Wadsworth Thomson Learning.
- Lukita, F. H. (2016). *Respon Elit Muhammadiyah Terhadap Gerakan Islam Radikal Di Kota Makassar*. UIN Alauddin Makassar.
- Maarif, A. S. (2009). *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*. Jakarta: Mizan.
- Mahendra, Y. I. (2022). *Analisis Penerapan Sikap Moderasi Beragama Pada Masyarakat Kelurahan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara*. Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Marjuwwa, P. M., & Anshori, I. (2023). *Keberagamaan Masyarakat Muslim Inklusif di Perum Royal Residence Surabaya: Analisis Fenomenologi Edmund Husserl*. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, 9(1), 46-61. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis*. Sage Publications.
- Moleong, Lexy. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mubasyaroh. (2017). *Strategi Dakwah Persuasif dalam Mengubah Perilaku Masyarakat*. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 11(2), 311-324. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v1i2.2398>
- Muchtar, N. E. P., Imam Suprayogo, & Triyo Supriyatno. (2021). *Educational Values of Religious Tolerance and Nationalism in Lamongan Islamic Boarding School*. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 16(1), 111-126. <https://doi.org/10.19105/tjpi.v16i1.4695>
- Muchtar, N. E. P., Suprayogo, I., & Supriyatno, T. (2021). *The Implications of Religious Tolerance and Nationalism Values at Islamic Boarding School*. *AL-ISHLAH:*

- Jurnal Pendidikan, 13(3), 2917-2930.
<https://doi.org/10.35445/alishlah.v13i3.705>
- Mujahidin, M. S. (2023). Religious Moderation of Nadhlatul Ulama and Muhammadiyah in Combating Religious Radicalism in Indonesia. *El -Hekam*, 8(1), 231-248.
<https://doi.org/10.31958/jeh.v8i1.9201>
- Murtadlo, M. (2019). *Menakar Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi*. Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Muttaqien, M. (2023). Konsep Komunikasi Jurgen Habermas Dalam Ide Demokrasi Deliberatif Dan Tindakan Komunikatif. *Linimasa : Jurnal Ilmu Komunikasi*, VI(1), 51-64.
<https://doi.org/https://journal.unpas.ac.id/index.php/linimasa/article/download/6067/2770>
- Muttaqin, A., & Zaeny, A. (2022). *Moderasi Beragama Dikalangan Organisasi Keagamaan Islam (Studi Pemahaman dan Kesadaran Moderasi Beragama Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah dan Jamaah Tabligh Lampung)*.
- Nada, I. S., Achadi, Q. A., & Mubin, N. (2025). Mewujudkan Masyarakat Multikultural: Sinergi dalam Perbedaan. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 2(2), 383-390.
<https://doi.org/https://jurnalisticomah.org/index.php/jppi/article/view/3285/2305>
- Nasaruddin Umar. (2019). *Islam Nusantara Jalan Panjang Moderasi Beragama Di Indonesia* (J. Zarkasyi, Ed.; 1st ed.). PT Elex Media Komputindo.
- Nashir, H. (2010). *Muhammadiyah Gerakan Islam Modern: Sejarah, Ideologi, dan Amal Usaha*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Nashir, H. (2019). *Moderasi Indonesia dan Keindonesiaan : Perspektif Sosiologi*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Nashir, H. (n.d.). *Moderasi Indonesia dan Keindonesiaan*.
<https://www.bbc.com/indonesia/>
- Nasikhin, & Raharjo. (2022). Moderasi Beragama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Konsep Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 2(1), 19-34.
<https://doi.org/10.35878/islamicreview.v1i1.371>
- Nurdin, A., & Naqqiyah, M. S. (2019). Model Moderasi Beragama Berbasis Pesantren Salaf. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 14(1), 82-102.
- Nuzula, W., Nirzalin, N., Fauzi, F., & Fakhrurrazi, F. (2022). Resistensi Masyarakat Terhadap Geuchik Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 (Studi di Gampong

- Kampung Tengah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 8(1), 44. <https://doi.org/10.29103/jsds.v8i1.5877>
- Pasha, M. K., & Darban, A. A. (2019). Muhammadiyah sebagai gerakan Islam . *Surya Mediatama*.
- Purnomo, P., & Solikhah, P. I. (2021). Konsep Dasar Pendidikan Islam Inklusif : Studi Tentang Inklusivitas Islam Sebagai Pijakan Pengembangan Pendidikan Islam Inklusif. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 7(2), 114-127. <https://doi.org/10.18860/jpai.v7i2.13286>
- Qodir, Z. (2019). Muhammadiyah Memperkuat Moderasi Islam Memutus Radikalisme. *Maarif*, 14(2), 12-29. <https://doi.org/10.47651/mrf.v14i2.58>
- Qodir, Z. (2019a). Islam Berkemajuan dan Strategi Dakwah Pencerahan Umat. *Sosiologi Reflektif*, 13(2), 209-233. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/jsr.v13i2.1630>
- Qodir, Z. (2019b). Muhammadiyah Memperkuat Moderasi Islam Memutus Radikalisme. *Maarif Institute*, 14(2), 12-29.
- Rahayu, L. R., & Lesmana, P. S. W. (2020). Potensi Peran Perempuan dalam Mewujudkan Moderasi Beragama di Indonesia. *Jurnal Pustaka*, XX(1), 31-38.
- Rahmah, M. (2020). Moderasi Beragama dalam Alquran: studi pemikiran M. Quraish Shihab dalam Buku Wasatlyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Rahman, A. (2018). Nilai Pancasila Kondisi dan Implementasinya dalam Masyarakat Global. *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(1), 34-48.
- Reski, L. (2022). Pemikiran Muhammadiyah Tentang Moderasi Beragama (Studi Kasus di Kabupaten Mamuju Tengah). UIN ALauddin Makasar.
- Ridlo, U. (2023). Metode Penelitian Studi Kasus: Teori dan Praktik (A. Royani, Ed.; 1st ed.). *Publica Indonesia Utama* .
- Rochman, M. A. A., Ahrori, M. H., & Pangestuti, R. (2023). Pendekatan Sosiologi dan Antropologi Sebagai Solusi Alternatif Moderasi Beragama di Indonesia. *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 3(2), 103-110. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v%vi%i.2635>
- Rofik, M. N., & Misbah, M. (2021). Implementasi Program Moderasi Beragama yang Dicanangkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyumas di Lingkungan Sekolah. *Lectura: Jurnal Pendidikan*, 12(2), 230-245. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31849/lectura.v12i2.7611>

- Rofiq, M. (2016). Metode Dakwah Muhammadiyah Di Kabupaten Tapanuli Selatan. *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 2(1), 31. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v2il.400>
- Rohim, B. (2022). Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan Dalam Moderasi Beragama di Kauman Tahun 1912-1923 M. *Al-Manar : Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Islam*, 11(1), 1-11. <https://doi.org/DOI:10.36668/jal.v1il.375>
- Rosyidi, A. M. (2017). Model dan Strategi Pembelajaran Diklat. *Andragogi : Jurnal Diklat Teknis*, 5(1), 100-111. Retrieved from <https://www.neliti.com/id/publications/275079/model-dan-strategi-pembelajaran-diklat#cite>
- Saepulah, A. (2022). Manajemen Dakwah Dalam Islam Perspektif M. Qurais Shihab. *Al Imam: Jurnal Manajemen Dakwah*, 5(1), 27-43. Retrieved from <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alimam/article/view/4326%0Ahttps://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alimam/article/download/4326/2669>
- Salsabila, H., Yuliasuty, D. S., & Zahra, N. H. S. (2022). Peran Generasi Z dalam Moderasi Beragama di Era Digital. *Al-Adyan Journal of Religious Studies*, 3(2), 118-128.
- Shihab, M. Q. (2019). *Wasathiyah : Wawasan Islam Tentang Moderasi* (1st ed.). PT. Lentera Hati.
- Shofan, Moh. (2021). Muhammadiyah dan Moderasi Islam Etos Gerakan dan Strategi Aksi Muhammadiyah Jelang Muktamar Ke-48. *Maarif Institute: Arus Pemikiran Islam Dan Sosial*, 16(1), 5-14. <https://doi.org/https://doi.org/10.47651/mrf.v16il.129>
- Siswadi, G. A. (2024). Paradigma pendidikan Kritis Paulo Freire dan Relevansinya dalam pengembangan Pendidikan Humanis di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama*, 4(2), 176-187.
- Soediharto. (2003). *Menuju Pendidikan Nasional yang Relevan dan Bermutu*. Balai Pustaka.
- Suarnaya, I. P. (2021). Model Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal di Desa Pegayaman Kabupaten Buleleng. *Jurnal Widya Sastra Pendidikan Agama Hindu*, 4(1), 45-59.
- Subakti, A. (2023). Internalisasi Nilai-nilai Moderasi Beragama Melalui Ajaran Kerohanian Persaudaraan Setia Hati Terate Komisariat IAIN Ponorogo. *Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*.

- Sudarman. (2023). *Moderasi Beragama Sudut Pandang Orang Muhammadiyah* (Hasbullah, Ed.; 1st ed.). Penerbit Samudra Biru.
- Sudarman. (2023). *Moderasi beragama: sudut pandang orang Muhammadiyah*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Alfabeta.
- Supriadi, E., Ajib, G., & Sugiarto, S. (2020). Intoleransi dan Radikalisme Agama: Konstruksi LSM tentang Program Deradikalisasi. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 4(1), 53–72. <https://doi.org/10.21580/jsw.2020.4.1.4544>
- Suzan, K. (1995). *Penguasa dan Kelompok Elite: Peranan Elite Penentu dalam Masyarakat Modern* (1st ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Syabuddin, Muhammad, & Sakdiah. (2022). *Model Pembinaan Moderasi Beragama Santri di Indonesia*.
- Thaib, E. J. (2020). The communication strategies for moderate islamic Da'wah in countering radicalism in Gorontalo city, Indonesia. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 36(4), 143–156. <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2020-3604-09>
- TIM CNN Indonesia. (2019). *LSI: Intoleransi di Era Jokowi Masih Tinggi*. CNN Indonesia.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1999). *Kamus besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Ugwu, C. I., Ekere, J. N., & Onoh, C. (2021). Research Paradigms And Methodological Choices in The Research Proces. *Information Science and Technology*, 14(2), 116–124.
- Umam, K. (2022). *Model Pendidikan Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan (Studi Kasus Di SMP Muhammadiyah 06 Wuluhan dan SMP 09 Ma'arif NU Ambulu)*.
- Umar, N. (2019). *Islam Nusantara: Jalan Panjang Moderasi Beragama di Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Wardi, M., Alias, N. A., Hidayat, T., & Hali, A. U. (2023). Implementation of Education Based on Religious Moderation. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 4(1), 163–179. <https://doi.org/10.31538/tijie.v4i1.313>
- Yuniar, T. (1987). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. PT. Agung Media Mulia.
- Yunita, Arifi, A., & Firdausi, F. (2024). Moderasi beragama di era cyber religion (studi kasus mahasiswa ilmu al- qur'an dan tafsir uin sunan kalijaga yogyakarta). *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 9(2), 449–462.

- Zaenuri, Marzuki, & Jami'ah, Y. (2013). Internalisasi Nilai-Nilai Karakter Melalui Pembelajaran Tematik Terpadu Di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Mumtaz Pontianak. *Jurnal Basicedu*, 1(1), 1-8.
- Zamroji, N., Rosyadi, Z., Nahdiyah, U., & Widiastuti, M. R. (2021). Model Moderasi Beragama di Desa Sidodadi Kecamatan Garum Kabupaten Blitar. *Jurnal Pendidikan: Riset & Konseptual*, 5(4), 572-580. https://doi.org/10.28926/riset_konseptual.v5i4.413
- Zulkifli. (2008). *Antropologi Sosial Budaya* (A. Sofyan, Ed.). Shiddiq Press Bangka.
- Zuly Qadir. (2019). Muhammadiyah Memperkuat Moderasi Islam Memutus Radikalisme. *Maarif*, 14(2), 12-29.

Tentang Penulis



Muhammad Wahid Nur Tualeka, S.Th.I., M.Pd.I., lahir di Surabaya pada 22 November 1983. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) di bidang Perbandingan Agama pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tahun 2006, dan melanjutkan studi magister (S2) dalam Pemikiran Pendidikan Islam di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya, lulus pada tahun 2009. Saat ini, penulis sedang menyelesaikan studi doktoral (S3) di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.

Sejak tahun 2009, penulis menjadi dosen di Program Studi Studi Agama-Agama Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dalam kapasitasnya sebagai dosen, penulis memiliki keahlian dalam bidang sosiologi agama, dengan minat khusus pada Pendidikan Islam dan hubungan antara agama dan struktur sosial dalam masyarakat. Dengan pengalaman penulis dalam bidang pendidikan tinggi, beliau aktif berkontribusi dalam pengembangan kajian agama, serta mengajar dan melakukan penelitian yang berfokus pada pendidikan Islam dan dinamika sosial agama di Indonesia dan dunia.

Glosarium

Afektif

Ranah yang berkaitan dengan perasaan, sikap, dan emosi seseorang terhadap suatu nilai atau ajaran.

Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Prinsip Islam yang berarti mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.

Balai RW/Balai Warga

Fasilitas umum di tingkat rukun warga yang digunakan sebagai tempat pertemuan dan kegiatan sosial masyarakat.

Bil-Hal

Metode dakwah melalui tindakan nyata atau teladan dalam kehidupan sehari-hari.

Bil-Lisan

Metode dakwah melalui lisan, seperti ceramah, khutbah, atau diskusi.

Bil-Qalam

Metode dakwah melalui tulisan, baik dalam media cetak maupun digital.

Dialog Lintas Iman

Pertemuan atau diskusi antara pemeluk agama berbeda untuk saling memahami dan membangun toleransi.

Elit Muhammadiyah

Tokoh atau pimpinan Muhammadiyah di tingkat lokal maupun nasional yang memiliki pengaruh strategis dalam menentukan arah dakwah.

FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama)

Lembaga di tingkat daerah yang berfungsi memelihara kerukunan antarumat beragama.

Ghuluw

Sikap berlebihan atau ekstrem dalam memahami dan mempraktikkan ajaran agama.

Internalisasi

Proses menanamkan nilai hingga menjadi bagian dari kebiasaan dan perilaku individu.

Ishlah

Upaya perbaikan atau perdamaian dalam hubungan antarindividu maupun kelompok.

I'tidal

Sikap adil dan proporsional dalam bersikap dan bertindak.

Kampung Toleransi

Sebutan untuk lingkungan permukiman di Surabaya yang mempraktikkan kehidupan harmonis antarumat beragama melalui kegiatan bersama dan saling membantu.

Kognitif

Ranah yang berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, dan pola pikir.

Maslahah ‘Ammah

Kemaslahatan umum atau kepentingan bersama yang menjadi tujuan utama hukum Islam.

Moderasi Beragama (Wasathiyyah)

Sikap beragama yang seimbang, tidak ekstrem, serta mengedepankan keadilan, toleransi, dan kemaslahatan.

Multikultural

Keadaan masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok budaya, etnis, dan agama.

Proposisi

Pernyataan atau rumusan yang berfungsi menjelaskan atau merumuskan hasil penelitian.

Resolusi Konflik

Proses penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui cara-cara damai.

Tasamuh

Sikap toleran terhadap perbedaan pandangan, keyakinan, dan budaya.

Tawassuth

Sikap tengah-tengah, tidak condong ke ekstremisme atau liberalisme berlebihan.

Washatiyah

Prinsip keseimbangan dalam Islam yang menjadi dasar moderasi beragama.

Indeks

A

Afektif, 117
Amar Ma'ruf Nahi Munkar, ix, 26, 117

B

Balai RW/Balai Warga, 117
Bil-Hal, ix, 57, 117
Bil-Lisan, ix, 55, 117
Bil-Qalam, ix, 60, 117

D

Dialog Lintas Iman, 117

E

Elit Muhammadiyah, ix, x, 33, 94, 105, 109, 118

F

FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), 118

G

Ghuluw, 118

I

Internalisasi, vi, x, 67, 105, 112, 114, 118
Ishlah, vi, ix, 33, 42, 118

K

Kampung Toleransi, 118
Kognitif, 118

M

Maslahah 'Ammah, 119
Moderasi Beragama (Wasathiyah), 119
Multikultural, ix, 49, 110, 119

P

Proposisi, 119

R

Resolusi Konflik, 119

T

Tasamuh, vi, ix, 33, 42, 119
Tawassuth, vi, ix, 42, 43, 44, 119

W

Washatiyah, ix, x, 29, 77, 78, 119

Baca & Dapatkan Buku ini Melalui:



Gramedia

DIGITAL

PT Revormasi Jangkar Philosophia



Shopee

Penerbit Revormasi



Membangun MODERASI BERAGAMA

Peran Dakwah Elit di Surabaya

Moderasi beragama bukan sekadar jargon, melainkan sebuah kebutuhan mendesak di tengah masyarakat yang majemuk. Buku ini mengajak pembaca memahami bagaimana para elit Muhammadiyah di Kota Surabaya membangun dan menginternalisasikan nilai-nilai moderasi melalui dakwah yang inklusif, dialogis, dan berlandaskan prinsip washatiyah.




Profil Penulis



Muhammad Wahid Nur Tualeka, S.Th.I., M.Pd.I., lahir di Surabaya pada 22 November 1983. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) di bidang Perbandingan Agama pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tahun 2006, dan melanjutkan studi magister (S2) dalam Pemikiran Pendidikan Islam di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya, lulus pada tahun 2009. Saat ini, penulis sedang menyelesaikan studi doktoral (S3) di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.

Sejak tahun 2009, penulis menjadi dosen di Program Studi, Studi Agama-Agama, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dalam kapasitasnya sebagai dosen, penulis memiliki keahlian dalam bidang sosiologi agama, dengan minat khusus pada Pendidikan Islam dan hubungan antara agama dan struktur sosial dalam masyarakat. Dengan pengalaman penulis dalam bidang pendidikan tinggi, beliau aktif berkontribusi dalam pengembangan kajian agama, serta mengajar dan melakukan penelitian yang berfokus pada pendidikan Islam dan dinamika sosial agama di Indonesia dan dunia.



 www.revormasi.com
 Penerbit Revormasi
 @penerbitrevormasi

